

92/HD/90

Laporan Penelitian

RELEVANSI PROGRAM KELOMPOK BELAJAR PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (KBPKK) DENGAN KEBUTUHAN BELAJAR MASYARAKAT
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT



PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
KOLEKSI BIDANG ILMU
TIDAK DIPINJAMKAN
KONSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Oleh

Drs. A. Muri Yusuf, M.Pd.

Penelitian ini dibiayai oleh:

SPP/DPP IKIP Padang Tahun Anggaran 1988/1989
Surat Perjanjian Kerja No.: 03/PT.37.H9/N.9 /1988
Tanggal 1 November 1988

UKIP

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1989

A B S T R A K

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1973 No: DD/121/PMD/III/2/73, maka pelaksanaan PKK diintegrasikan ke dalam Lembaga Sosial Desa, dan dengan Instruksi Mendagri No : 10 tahun 1980, tanggal 15 Februari 1980, setiap daerah diharuskan melaksanakan PKK dan diwajibkan membentuk Tim Penggerak PKK mulai tingkat Provinsi sampai tingkat desa dengan wanita sebagai motor penggeraknya.

Kabupaten 50 Kota telah lama mulai melaksanakan kegiatan PKK (10 program pokok PKK). Kegiatan-kegiatan itu telah dilaksanakan sampai dengan unit pemerintah terkecil (desa). Tingkat keterlaksanaan program bervariasi menurut situasi, fasilitas dan kondisi setempat.

Oleh karena itu melalui penelitian peneliti ingin mengungkapkan bagaimanakah relevansi program PKK dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu ingin mengetahui bagaimana perencanaan pelaksanaan Program PKK di Kabupaten 50 Kota terutama sekali pada Kecamatan Luhak dan Kecamatan Kapur IX.

Hipotesis yang ingin diuji melalui penelitian ini adalah : "Tidak terdapat relevansi antara program PKK dengan kebutuhan masyarakat". Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner, angket dan wawancara, sedangkan populasi penelitian adalah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa, Kader PKK dan Anggota PKK pada Kecamatan Luhak dan Kapur IX Kabupaten 50 Kota. Sampel penelitian sebanyak 46 orang.

Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan teknik persentase dan analisis kualitatif.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dalam menyusun rencana program PKK telah mengikutsertakan Kader PKK dan anggota PKK, di samping itu telah juga menampung saran-saran dari pimpinan organisasi wanita. Dalam penyusunan rencana kegiatan dan prioritas pelaksanaan kebutuhan masyarakat merupakan faktor utama yang dipertimbangkan.

Tingkat keterlaksanaan program bervariasi antara kecamatan Lurah dan Kapur IX ; sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Kesepuluh program pokok PKK telah dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap warga masyarakat. Program yang ada berarti bagi kehidupan masyarakat desa. Justru karena itu program PKK relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penemuan di atas dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk penyempurnaan dan pengembangan PKK pada masa datang oleh Tim Penggerak PKK dan unit pemerintah lainnya yang terkait dengan pembangunan masyarakat Desa.

NO. SURAT	Des 89
SARAN/REKOMENDASI	HD
LOKASI	KI
TANGGAL	92/MD/90-R(2)
DIKIRIM KE	374.0072 R YUS R

P E N G A N T A R

Kegiatan penelitian merupakan bahagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini harus dilakukan oleh staf akademik IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu baik sebagai staf akademik atau peneliti.

Kegiatan penelitian ini mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini Pusat Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong staf pengajar untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya. Oleh karena itu pengembangan kualitas penelitian dilakukan dengan menyusun tuntutan kualitas itu dengan tahapan kewenangan akademik peneliti.

Akhirnya saya merasa gembira bahwa penelitian ini telah dapat diselesaikan oleh peneliti dengan melalui proses pemeriksaan dari tim penilai laporan penelitian Puslit IKIP Padang. Mudah-mudahan penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pada umumnya dan untuk peningkatan mutu staf akademik IKIP Padang pada khususnya.

Terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian
IKIP Padang,



Dr. Zainil, M.A.

NIP.130 187 088

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	1
PENGANTAR	111
DAFTAR ISI	111
DAFTAR LABEL	111
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah	5
C. Penjelasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	8
E. Asumsi	9
F. Hipotesis	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	12
A. Tinjauan Kepustakaan	12
B. Kerangka Konseptual	15
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	16
A. Rancangan Penelitian	16
B. Populasi dan Sampel	17
C. Jenis dan Sumber Data	18
D. Teknik dan Alat Pengumpul Data	19
E. Teknik Analisis Data	21
F. Prosedur Penelitian	22
G. Keterbatasan-keterbatasan Penelitian	24
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	25
A. Analisis	25

MILIK UPTI PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Halaman	
B. Pembahasan	71
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	78
A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi	81
DAFTAR KEPUSIAKKAAN	83
TAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Sampel Penelitian	18
4.1 Keterlaksanaan Program PKK Tahun 1987/1988 Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	28
4.2 Tim Penggerak PKK Kecamatan Luhak yang Telah Mengikuti Penataran P4 Menurut Tim Penggerak PKK	30
4.3 Pelaksanaan Penataran P4 Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	32
4.4 Manfaat Penataran P4 bagi Perubahan Sikap dan Pengetahuan Peserta, Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	33
4.5 Jenis-jenis Kegiatan Gotong Royong yang Telah Dilaksanakan Oleh Kelompok PKK Tahun 1987/1988, Menurut Tim Penggerak PKK Kecamatan	35
4.6 Jumlah Penduduk yang Buta Huruf, Jumlah Warga Belajar Paket A di Kecamatan Luhak Tahun 1987/1988, Menurut Tim Penggerak PKK Kecamatan	38
4.7 Jenis Pendidikan Ketrampilan yang Dilaksanakan di Kecamatan Luhak Tahun 1987/1988, Menurut Tim Penggerak PKK Kecamatan	39
4.8 Peran Serta Anggota Masyarakat dalam Pengembangan Koperasi Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	42
4.9 Industri Rumah Tangga Swadaya yang Dibina PKK pada Kecamatan Luhak dan Kapur IX Tahun 1987/1988 Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	45

4.10	Jumlah Rumah Sehat pada Kecamatan Luhak dan Kapur IX Tahun 1987/1988 Menurut Tim Penggerak PKK Kecamatan	47
4.11	Persentase Penyediaan Sumber Air Bersih Oleh Kepala Keluarga dalam Kecamatan Luhak dan Kapur IX Tahun 1987/1988 Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	50
4.12	Keikutsertaan Kader dan Anggota PKK dalam Menyusun Rencana PKK Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	52
4.13	Faktor yang Dipedomani dalam Menyusun Rencana Kegiatan PKK Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	53
4.14	Kesesuaian Program PKK dengan Kebutuhan Masyarakat Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	55
4.15	Relevan/Tidaknya Kegiatan Gotong Royong dengan Kebutuhan Masyarakat Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	58
4.16	Manfaat Gotong Royong Terhadap Kesejahteraan Anggota Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	60
4.17	Kesesuaian Materi Kegiatan dengan Kebutuhan Masyarakat Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	62
4.18	Relevansi Pengembangan Kehidupan Berkoperasi dengan Kebutuhan Masyarakat Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	64
4.19	Manfaat Warung PKK, Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	65

4.20	Keseimbangan Warung PKK dan Usaha Rumah Tangga Swadaya dengan Jumlah Keluarga Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	66
4.21	Relevansi Jenis Kegiatan Posyandu dan KB Terhadap Kebutuhan Masyarakat Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	68
4.22	Peranan Tabungan Masyarakat bagi Kesejahteraan Keluarga Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK	69

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 ditegaskan bahwa : Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Ini berarti dalam rencana pembangunan jangka panjang di seluruh Indonesia dan pada semua lapisan dalam masyarakat diharapkan menikmati hasil pembangunan sesuai dengan pola dan strategi pembangunan masing-masing daerah. Karena itu strategi pembangunan tiap propinsi, kabupaten, kotamadya dan kecamatan serta pada desa hendaklah merupakan bagian integral dan kerangka dasar dalam pembangunan nasional.

Melalui cara yang demikian diharapkan semua lapisan dalam masyarakat menikmati hasil pembangunan yang merata sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang layak bagi mereka.

Insan-insan pembangunan yang tinggal di kota dan di desa adalah tenaga penggerak pembangunan, pengambil inisiatif, pelaksana dan pelayan pembangunan serta penyangga kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi.

Masyarakat desa akan mampu mendukung pembangunan dan menciptakan pemerataan hasil pembangunan apabila mereka menggali dan memanfaatkan potensi desa semaksimal mungkin sehingga dapat memenuhi kebutuhan tiap individu dan masyarakat sekitarnya.

Kondisi yang demikian hanya mungkin apabila warga desa mempunyai pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Di samping itu ada gerakan dalam masyarakat yang mendukung membina dan mengembangkan potensi tersebut.

Apabila kita perhatikan tingkat taraf hidup yang tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi masyarakat desa seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan, maka kepadatan penduduk desa lebih rendah dari kota, income perkapita rendah, lembaga sarana pendidikan terbatas dan kesehatan belum mendapatkan pelayanan yang selayaknya. Kehidupan masyarakat desa masih terbatas karena sumber alam yang ada belum terolah secara sistematis, belum teroganisir dan terkendali secara terpadu sehingga potensi yang cukup banyak tersimpan belum memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan anggota masyarakat.

Pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang dimiliki anggota masyarakat belum dapat mengangkat harkat masyarakat desa untuk berswakarya dalam pola kehidupan yang dinamis dan mantap.

Berbagai kekurangan yang terdapat pada anggota masyarakat seperti kekurangan gizi, kurang pendidikan, kekurangan dalam pelayanan kesehatan menunjukkan adanya ketimpangan tersebut. Secara umum dapat dikatakan salah satu tantangan yang dihadapi anggota masyarakat desa kurangnya pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam menuju hidup sejahtera, bahagia lahir dan bathin.

Salah satu kebijaksanaan yang diambil pemerintah ialah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1973, No. DD/121/PMD/III/2/1973 mengenai pelaksanaan PKK yang diintegrasikan dengan Lembaga Sosial Desa (LSD).

Dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 tahun 1980 tanggal 12 Februari 1980, setiap daerah diharuskan melaksanakan PKK dan diwajibkan membentuk mekanisme pembinaannya dengan membentuk Tim Penggerak PKK di setiap tingkatan pemerintahan mulai tingkat propinsi sampai ke tingkat kecamatan sebagai wadah penggerak masyarakat dengan wanita sebagai motor penggeraknya.

Dengan dicantulkannya PKK dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1983, merupakan suatu bukti bahwa PKK mendapat kepercayaan dari seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pembangunan melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Selanjutnya pada tanggal 4 April 1984 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan No. 28 tahun 1984, tentang tujuan, azas, pengertian serta sasaran PKK. Di samping itu juga dipertegas tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab

Tim penggerak PKK. Dengan demikian jelaslah program pembinaan dan pedoman pelaksanaan PKK pada masing-masing daerah telah dirancang secara matang dan terarah dengan wanita sebagai motor penggeraknya.

Di Sumatera Barat, terutama sekali di Kabupaten 50 Kota (daerah penelitian) Tim Penggerak PKK telah lama dibentuk mulai tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan. Program-program yang ada (10 program pokok PKK) telah dilaksanakan pada unit-unit di atas.

Tingkat keterlaksanaan program yang ada sangat bervariasi karena kondisi daerah yang berbeda dan pembiayaan yang masih terbatas. Di samping itu kesesuaian program, faktor pengelolaan, fasilitas/sarana dan keadaan anggota keluarga sangat menentukan pola keberhasilan program dalam menunjang pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Justru karena itu sebagai langkah pendahuluan untuk memahami program PKK dengan semua aspeknya, penulis melakukan penelitian tentang "Relevansi Program PKK dengan Kebutuhan Masyarakat di Kabupaten 50 Kota" (Studi Kasus). Dengan cara tersebut akan terjawab pertanyaan seperti: "Sesuaiakah program PKK yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat? Cukup berartikah semua kegiatan itu dalam menunjang perkembangan kehidupan ke arah yang lebih baik?"

Walaupun penelitian itu baru merupakan studi kasus, namun hasil penelitian akan sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pembinaan PKK sebagai masukan untuk

penyempurnaan program PKK masa yang akan datang.

B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Berhubung karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, "Kecocokan program yang diberikan dalam PKK dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Luhak dan Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota", maka ruang lingkup penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam Pendidikan Luar Sekolah yang dikaitkan dengan kebutuhan dan pembangunan masyarakat.

Ruang lingkup penelitian secara spesifik dibatasi pada sepuluh aspek program PKK yang mencakup :

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan tatalaksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan ketrampilan
7. Kesehatan
8. Mengembangkan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan sehat

Kesepuluh aspek tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu :

- a. P4 dan Gotong Royong
- b. Pendidikan dan Koperasi
- c. Sandang, pangan dan papan
- d. Kesehatan, lingkungan hidup dan perencanaan sehat

Dari satu sisi peneliti ingin mengungkapkan perencanaan/pelaksanaan ke 10 aspek program PKK tersebut di atas.

Di samping itu peneliti juga ingin mengungkapkan bagaimana kesesuaian program PKK tersebut dengan kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Luhak dan Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindarkan terjadinya salah satu pengertian dalam memahami konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa batasan sebagai berikut :

1. Relevansi

Kata relevansi berasal dari bahasa Inggris "relevant", yang berarti "Supply the facts to case (menyediakan fakta-fakta terhadap kasus yang ada) sedangkan "relevancy" (nn) dalam hal ini adalah ketersediaan fakta terhadap kasus.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan relevansi adalah kesesuaian atau kecocokan program dengan kebutuhan masyarakat.

2. **PKK**

a. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (untuk selanjutnya disebut dengan PKK) adalah suatu gerakan pembangunan masyarakat dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit

atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

b. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dapat juga dikatakan keluarga sejahtera yaitu keluarga yang tata kehidupan dan penghidupannya diliputi oleh rasa saling pengertian, tenggang rasa, kegotongroyongan dalam suasana kekeluargaan yang harmonis.

c. Program PKK

Program merupakan sekelompok atau sejumlah kegiatan yang akan dilakukan, sedangkan pengertian PKK telah dikemukakan sebelum ini. Oleh karena itu yang dimaksud program PKK dalam penelitian ini adalah sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembinaan keluarga. PKK memiliki 10 program pokok yang telah diturunkan oleh Tim Penggerak PKK Pusat dan seragam untuk seluruh Indonesia. Kesepuluh program PKK itu mencakup (a) P 4, (b) gotong royong, (c) pangan, (d) sandang, (e) perumahan dan tataaksana rumah tangga, (f) pendidikan dan ketrampilan, (g) kesehatan, (h) mengembangkan kehidupan berkoperasi, (i) kelestarian lingkungan hidup, dan (j) perencanaan sehat.

d. Kebutuhan Masyarakat

Terdiri dari dua kata : kebutuhan dan masyarakat. Kebutuhan berasal dari kata-kata "butuh" yang mendapat awalan "me" dan akhiran "an". Butuh berarti perlu, sedangkan kebutuhan adalah keperluan. Menurut tingkatannya kebutuhan itu dapat dibedakan kebutuhan primer, kebutuhan skunder dan kebutuhan tertiiar. Dalam penelitian ini kebutuhan itu hanya dimaksudkan adalah keperluan primer dan sekunder. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Justu karena itu yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat dalam penelitian ini adalah keperluan dari setiap kelompok manusia yang hidup bersama dalam waktu cukup lama dan merupakan suatu kesatuan dan suatu sistim hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

D. Tujuan Penelitian

Program PKK pada Kecamatan Luhak dan Kapur IX di Kabupaten 50 Kota telah lama dilaksanakan. Kesepuluh aspek dalam program PKK telah dibina dan dikembangkan oleh Tim Penggerak PKK tiap desa. Berbagai usaha telah dijalankan.

Pembinaan terus dilanjutkan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Sampai saat ini belum diketahui apakah program yang ada itu memang relevan (cocok) dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Luhak dan Kapur IX Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Relevan/tidaknya program PKK dengan kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Luhak dan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.
2. Bagaimana penyelenggaraan PKK pada kedua kecamatan itu. Apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan program yang ada. Apakah kegiatan yang ada dalam program direncanakan secara periodik atau insidental kapan ada kepentingan tertentu.

Di samping itu hasil penelitian ini dapat pula memberikan rekomendasi pada tim penggerak PKK pada kedua kecamatan tersebut untuk penyempurnaan dan program PKK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang.

E. Asumsi

Berhubung karena penelitian ini merupakan studi kasus untuk mengetahui relevansi program PKK dengan kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Luhak dan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, ada beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sepuluh program pokok PKK telah dilaksanakan pada Kecamatan Luhak dan Kapur IX.

2. Tim penggerak PKK kecamatan telah mengarahkan dan membimbing tim penggerak PKK Desa dalam menunjang terlaksananya 10 program PKK.
3. Kader umum dan kader khusus PKK berfungsi secara aktif dalam membimbing anggota PKK.
4. Semua respondent (tim penggerak PKK kecamatan dan desa, kader umum dan khusus serta anggota PKK yang terpilih sebagai sampel) memberikan jawaban dengan jujur dan objektif:

F. Hipotesis

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan dan tujuan yang dicapai melalui penelitian, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

"Tidak terdapat relevansi antara program PKK dengan kebutuhan masyarakat".

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Walaupun penelitian "Relevansi program PKK terhadap kebutuhan masyarakat" masih merupakan studi kasus, namun penelitian ini tetap berguna dalam perkembangan ilmu dan teknologi serta pembangunan. Sehubungan dengan itu penelitian ini sangat bermanfaat/berguna bagi :

1. Direktorat Pembangunan Desa Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Tim Penggerak PKK tingkat Provinsi dalam rangka pengembangan program PKK untuk masa datang.
2. Bupati/KDH tingkat II Kabupaten 50 Kota dan ketua tim

penggerak PKK tingkat II Kabupaten 50 Kota, sehubungan dengan penyelenggaraan PKK pada kedua kecamatan tersebut.

3. Camat dan ketua tim penggerak PKK Kecamatan Luhak dan Kecamatan Kapur IX dalam rangka peninjauan kembali program PKK yang telah dilaksanakan dan penyempurnaan program PKK untuk masa datang, baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaannya.
4. Organisasi wanita seperti Dharmawanita dan Pertiwi dan Bidang Pendidikan Masyarakat yang langsung dan tidak langsung terlibat dalam penyempurnaan kegiatan-kegiatan PKK untuk masa datang.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Kepustakaan

Kalau kita perhatikan perkembangan wanita Indonesia dari dahulu sampai sekarang, maka untuk wanita pada masa dahulu, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kaum wanita kurang mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, terutama sekali wanita di pedesaan.
2. Keterbatasan dalam bidang pendidikan dan ketrampilan mengakibatkan rendahnya penghasilan yang mereka terima.
3. Keterbatasan dalam bidang pendidikan yang ketrampilan yang menyebabkan mereka kurang sadar apa yang seharusnya mereka lakukan dan terbatasnya peran serta mereka dalam masyarakat di samping itu kurangnya kesempatan bagi mereka untuk berperan.

Keadaan itu sekarang telah jauh berubah, mulai tahun 1957 dengan prakarsa Kementerian Kesehatan Bagian Pendidikan dan makanan rakyat diadakanlah Seminar Home Economic. Seminar ini dilaksanakan di Bogor dan dihadiri berbagai unsur yang terkait dalam pembinaan kaum wanita dan pembangunan. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan membentuk panitia untuk menyusun mata pelajaran dengan materi 10 segi pokok dalam kehidupan keluarga.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah (bottom up planning) dengan wanita sebagai motor penggerakannya untuk membangun keluarga guna menumbuhkan, mengarahkan dan membina keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahteraan melalui program PKK wanita di bekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan, dan perkembangan masyarakat yang tidak ada fungsinya dalam keluarga dan masyarakat. Gerakan PKK juga dapat diartikan sebagai suatu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan dalam pembangunan melalui keluarga sehingga mampu:

1. Berpartisipasi dalam pembangunan
2. Mewujudkan keluarga sejahtera
3. Membina generasi muda.

Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa adanya program PKK akan merupakan salah satu aspek yang ikut menentukan perubahan yang akan terjadi dalam masyarakat. Kondisi yang demikian sangat mungkin terjadi karena dengan dalam 10 program pokok PKK diberikan pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang terkait dengan pembinaan individu sebagai pribadi dan warga masyarakat yaitu :

- a. Wanita sebagai isteri pendamping suami.
- b. Wanita sebagai pengelola rumah tangga.
- c. Wanita sebagai penerus keturunan.
- d. Wanita sebagai Ibu pendidik anak-anak.
- e. Wanita sebagai pencari nafkah tambahan.

f. Wanita sebagai warga masyarakat.

Pencapaian tugas dan fungsi wanita tersebut dapat diwujudkan dengan 10 program pokok PKK yaitu: (1) P 4, (2) gotong royong, (3) pangan, (4) sandang, (5) perumahan dan tatalaksana rumah tangga, (6) pendidikan dan ketrampilan, (7) kesehatan, (8) mengembangkan kehidupan berkoperasi, (9) kelestarian lingkungan hidup, dan (10) perencanaan sehat.

Pangan, sandang dan perumahan merupakan kebutuhan pokok/primer bagi setiap individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga. Pendidikan/ketrampilan dan kesehatan merupakan kebutuhan lain yang akan menentukan pula kelanjutan keluarga sejahtera yang didambakan oleh setiap keluarga. Bahkan dalam abad informasi dan teknologi yang berkembang dengan cepat pendidikan dan kesehatan dapat dikategorikan ke dalam kebutuhan primer.

Menu yang kurang, kadar protein yang terbatas, perumahan dan tatalaksana rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan hidup sehat, akan menghambat pembinaan keluarga sejahtera.

Keterbatasan pendidikan dan ilmu pengetahuan akan mempersempit pandangan dan membatasi ruang gerak dalam usaha membina keluarga sejahtera lahir dan bathin.

Program kesehatan, lingkungan hidup dan perencanaan sehat dari program PKK yang tepat akan dapat membantu kehidupan keluarga yang lebih teratur dan sehat, sebaliknya program yang tidak terlaksana, kurang tepat akan mengganggu pula dalam pembinaan keluarga.

B. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian kasus ini ingin diungkapkan kesesuaian program PKK terhadap kebutuhan masyarakat. Sepuluh program pokok PKK merupakan variabel bebas (Independent Variable). Berhubung karena penelitian bukan penelitian sebab akibat dan bukan pula ingin melihat pengaruh, tetapi sekedar melihat ketrkaitan program yang ada dengan kebutuhan warga masyarakat anggota PKK, maka ketergantungan kedua jenis variabel seperti di atas tidaklah begitu dominan.

Sepuluh program pokok PKK yang telah dirancang secara nasional, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Luhak dan Kapur IX Kabupaten 50 Kota. Apakah program-program itu memang terkait dengan keadaan kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat di kedua kecamatan tersebut ?

Sebaliknya dapat pula dikatakan apakah kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada ke dua kecamatan dapat terisi dengan adanya 10 program pokok PKK itu, atau kegiatan dengan adanya sepuluh program pokok PKK, sumber alam dan manusia (Natural and human resources) yang ada pada ke dua kecamatan itu mempunyai nilai tambah (Value added) dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat.

Justru karena itu kedua variabel tersebut mempunyai hubungan "Reciprocal" yang dalam penelitian kasus ini hanya ingin dilihat tingkat kesesuaiannya, bukan hubungan sebab-akibatnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Seperti telah dikemukakan dalam tujuan yang ingin dicapai, dalam penjelasan istilah dan kerangka konseptual bahwa penelitian ini merupakan penelitian kasus yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai aspek, baik ditinjau dari segi bentuk penelitian, objek penelitian maupun generalisasi hasil penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-eksploratif yakni ingin menggambarkan apa adanya; namun dalam batas-batas kemungkinan yang dapat dijangkau juga ingin menerangkan dan menguji hipotesis sehingga penelitian ini dalam keterbatasannya juga merupakan deskriptif-explanatif. Secara sederhana rancangannya adalah :

10 Pokok
Program PKK

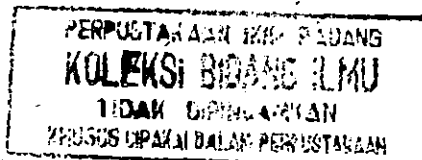
Kebutuhan
Masyarakat

Independent
Variable

Dependent
Variable

Penyelenggaraan
Program

Intervening Variable



B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Walaupun penelitian ini merupakan studi kasus, namun untuk dapat mengungkapkan permasalahan secara jelas dan tuntas di daerah kasus, maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah :

- a. Ketua Tim penggerak PKK kecamatan.
- b. Ketua Tim penggerak PKK desa.
- c. Kader khusus pada desa terpilih.
- d. Anggota PKK pada desa terpilih.

2. Sampel

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang terkait dengan permasalahan, dan dengan memperhatikan tersedianya data yang mungkin dikumpulkan dalam waktu yang terbatas serta dana/anggaran penelitian yang relatif kecil untuk penelitian lapangan, maka kecamatan yang dipilih adalah :

- a. Kecamatan Luhak.
- b. Kecamatan Kapur IX.

Kecamatan Luhak mewakili daerah 50 Kota, bagian Barat dan Utara, sedangkan Kecamatan Kapur IX mewakili daerah 50 Kota bagian Selatan dan Timur.

Langkah berikutnya adalah memilih dua desa pada tiap kecamatan secara random di antara sekian banyak desa yang telah melaksanakan program PKK. Kegiatan selanjutnya adalah memilih lima kader khusus dan lima anggota

keluarga PKK untuk tiap-tiap desa yang dijadikan daerah penelitian dengan demikian jumlah responden sebanyak 46 orang, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sampel Penelitian

No. : Klasifikasi Responden :	Kecamatan			Jumlah
	Luhak	:Kapur	IX	
1. Tim Penggerak PKK Kecamatan	1	1		2
2. Tim Penggerak PKK Desa	2	2		4
3. Kader khusus	10	10		20
4. Anggota PKK	10	10		20
Jumlah	23	23		46

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Data umum PKK, yang berkaitan dengan : jumlah desa, jumlah kelompok PKK, jumlah tempat kegiatan, jumlah kepala keluarga dan jumlah kader PKK, serta perencanaan pelaksanaan kegiatan PKK.
- b. Data kegiatan PKK : yang berkaitan dengan kegiatan kelompok kerja I, II, III dan IV.
- c. Data yang berkaitan dengan kesesuaian program PKK dengan kebutuhan masyarakat.

2. Sumber data

Jenis data pada butir 1. diperoleh melalui beberapa sumber data sebagai berikut :

- a. Data umum PKK diperoleh dari Tim penggerak-penggerak PKK kecamatan dan tim penggerak PKK desa.
- b. Data kegiatan PKK (kelompok kerja I, II, III dan IV) diperoleh dari Tim penggerak PKK kecamatan untuk semua daerah dalam kecamatannya dan Tim Penggerak Desa untuk desa yang terpilih.
- c. Data yang berkaitan dengan kesesuaian program PKK dengan kebutuhan masyarakat diperoleh dari Tim Penggerak PKK kecamatan dan desa, kader PKK serta anggota PKK yang terpilih jadi responden penelitian.

Pada prinsipnya kelompok c. ini adalah sama. Dalam penyusunan kalimat disesuaikan dengan tugas dan fungsi responden dalam PKK.

D. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Semua data yang diperlukan sesuai dengan jenis data yang telah dikemukakan sebelum ini, dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner/angket dan teknik wawancara (Interview). Untuk data umum PKK dan kegiatan PKK (jumlah kegiatan menurut jenisnya) dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap responden berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, sedangkan untuk kesesuaian program PKK dengan kebutuhan masyarakat digunakan angket.

Pedoman wawancara yang digunakan bersumber dari pedoman, lembaran data PKK yang disusun secara nasional, untuk seluruh Indonesia. Pedoman tersebut kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang ingin diungkapkan, sedangkan angket tentang kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat disusun tersendiri, melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Perumusan/penjabaran 10 program pokok PKK menjadi sub-sub variabel yang lebih terinci dan terkait dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pemilihan sampel perilaku/pengetahuan dari setiap program PKK berdasarkan hasil penjabaran di atas.
3. Penyusunan instrumen dan penyempurnaan pedoman wawancara.
4. Validasi instrumen.
 - a. Content Validity instrumen diperoleh dengan jalan :
 - 1). Memilih 3 orang ahli yang dianggap memahami program PKK. Ketiga tenaga itu adalah DR. Aliasar, MED (ahli PLS), Drs. Mujiran SU (ahli Psi-Pend.) dan Dra. Lisma Jamal (Tim Penggerak PKK Kodya Padang). Kepada mereka diserahkan konsep instrumen yang telah disiapkan.
 - 2). Berdasarkan hasil dari ketiga ahli tersebut, kemudian dicari validitas di antara "Rater" (Inter-rater). Oleh karena itu validitas butir instrument dilakukan dengan "expert judgement" dan

Analisis butir untuk mengetahui indeks diskriminasi butir tidak dilakukan. Untuk data umum dan kegiatan PKK tidak dicari validitasnya karena format-format yang ada hanya sebagai pedoman wawancara dan dapat disempurnakan pada waktu di lapangan. Di samping itu format yang ada sebagian besar diambil dari format Tim Penggerak PKK yang telah berlaku secara nasional.

- b. Reliabilitas instrumen dicari berdasarkan hasil uji coba pada ketiga ahli di atas dan dilengkapi 7 anggota keluarga. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan formula tertentu (Rulon's formula). Reliabilitas instrumen adalah 0.846.

- c. Cara pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan menyebarkan angket kepada responden, yang didatangi langsung ke tempat tinggal yang bersangkutan. Di samping itu juga dilakukan wawancara, sebagai pelengkap informasi yang dikumpulkan melalui angket. Untuk data umum PKK dan kegiatan PKK, pengumpul data mencatat langsung dari respondent berdasarkan bahan/informasi yang disediakan sebelumnya.

E. Teknik Analisis Data

Pada tahap awal yang dilakukan peneliti terhadap instrument yang dikumpulkan adalah mengecek kelengkapan pengisian setiap butir sesuai dengan petunjuk yang disediakan untuk

masing-masing angket. Dari semua data yang ada dan setelah diverifikasi ternyata memenuhi syarat untuk diolah dan dianalisis.

Kegiatan berikutnya adalah mentabulasi data ke dalam format yang telah disertakan dalam hal ini tidak ada sistim pembobotan untuk alternatif jawaban.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik persentase dan dalam aspek tertentu dilengkapi dengan penggambaran secara kualitatif berdasarkan data yang ada penggabungan kedua cara tersebut dimaksudkan untuk dapat "menggali" kasus lebih tuntas sesuai dengan permasalahannya.

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini, merupakan penelitian kasus dapat berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu sebelum pengumpul data turun ke lapangan, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Desember 1988

- a. Penandatanganan kontrak penelitian antara Kepala Pusat Penelitian IKIP Padang dengan Ketua peneliti.
- b. Penyempurnaan usul penelitian sesuai dengan dana yang tersedia.
- c. Menyusun operasional penelitian.
- d. Mengurus izin penelitian ke Puslit IKIP Padang melalui ketua jurusan PPB dan Dekan FIP IKIP Padang.

2. Januari 1989

- a. Berdasarkan surat Puslit IKIP Padang tanggal 31

Desember 1988 No. 1076/PT.37.H9/N.4/88 peneliti mengurus lagi izin penelitian ke Kadit Sospol Provinsi Sumatera Barat.

- b. Menyempurnakan instrumen penelitian, melakukan uji coba, mencari validasi dan reliabilitas instrumen.
- c. Berdasarkan izin penelitian dari Kadit Sospol 20 Januari 1989, No. 070/6/SOSPOL/I/1989 peneliti meminta izin penelitian lagi dari Bupati KDH 50 Kota.

3. Februari 1989

Dengan rekomendasi/izin penelitian yang dikeluarkan oleh Kadit Sospol Kabupaten 50 Kota No. 070/17/Sospol/I-1989 tanggal 25 Januari 1989 maka pengumpulan data responden yang terpilih baru dapat dilakukan mulai tanggal 28 Januari 1989. Pengumpulan data ini dilakukan oleh Drs. Zuhendri Zen, Drs. Daharnis dan Drs. Maizul Gosen FIP IKIP Padang, yang turun langsung ke daerah penelitian, dan dibantu secara tidak langsung oleh Tim Penggerak PFK kecamatan sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaiknya.

4. Maret 1989

- a. Melakukan verifikasi data.
- b. Tabulasi data.
- c. Melaksanakan analisis data.

5. April/Mei 1989

- a. Penyusunan konsep laporan.
- b. Revisi laporan.

c. Perbanyak laporan

G. Keterbatasan-Keterbatasan

Berhubung karena penelitian ini merupakan studi kasus, maka hasil penelitian hanya terbatas pada objek penelitian dan tidak berlaku untuk Sumatera Barat. Di samping itu jumlah sampel dan lokasi penelitian yang terbatas menyebabkan informasi yang diterima/dikumpulkan belum lengkap. Oleh karena itu hasil penelitian ini hanya dapat digeneralisasikan pada daerah yang mempunyai kondisi yang hampir serupa dengan daerah penelitian ini.

Hambatan-hambatan yang mendasar ditemui dalam penelitian ini boleh dikatakan tidak ada. Hambatan-hambatan ringan adalah proses perizinan yang cukup panjang, sehingga menyita sebagian waktu untuk itu. Di samping itu karena kesibukan-kesibukan responden yang dapat dipahami terdapat keterlambatan-keterlambatan pengembalian instrumen. Perlu juga dikemukakan di sini bahwa bantuan yang sangat besar diberikan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan dan desa sehingga penelitian ini dapat terlaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu, maka dalam bagian analisis hasil penelitian studi kasus ini akan dibicarakan dua hal yaitu :

1. Data umum dan data kegiatan PKK
2. Relevansi program PKK

pada Kecamatan Luhak dan Kapur IX Kabupaten 50 Kota. Pada bagian pembahasan akan dilihat hubungan, dengan teori yang ada.

A. Analisis

1. Data umum dan data kegiatan PKK

Pelaksanaan program PKK tidaklah dapat dipisahkan dari pada fasilitas yang terdapat pada suatu daerah binaan. Di samping itu akan ditentukan pula oleh keterlibatan anggota Tim penggerak PKK. Kader PKK dan anggota PKK sendiri. Pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif, responsif dan menempatkan tiap anggota sesuai dengan keberadaannya akan mampu mendorong dan menciptakan program yang menantang, menarik dan dilaksanakan, sebaliknya keterbatasan fasilitas (termasuk dana) akan mengganggu keterlaksanaan program. Binaan, bimbingan dan pengawasan yang kurang akan memperlambat dan mengganggu penyelesaian program.

Jumlah penduduk Kecamatan Luhak sebanyak 73.914 orang dengan luas daerah 43164 km². Rata-rata kepadatan penduduk 70/km², jumlah desa sebanyak 100 desa yang terdiri

dari 68 buah desa swasembada dan 32 buah desa swakarya. Dan tidak ada lagi desa dengan kategori swadaya (sebelum pembakaran). Di daerah ini terdapat 100 Tim Penggerak PKK Desa (dusun) dengan 10119 kelompok PKK Dasa wisma. Jumlah kepala keluarga yang terdapat di Kecamatan Luhak ini adalah 16107 kepala keluarga. Dikaitkan jumlah tersebut dengan jumlah penduduk dapat pula dikatakan bahwa rata-rata jumlah pada setiap keluarga hanya empat atau lima orang. Ini berarti pada setiap keluarga, hanya ada dua atau tiga anak saja. Oleh karena itu prinsip keluarga kecil telah dapat direalisasikan di Kecamatan Luhak ini.

Pelaksanaan program PKK di tiap-tiap desa dalam kecamatan ini dipimpin oleh Kader PKK. Di tingkat kecamatan dipimpin oleh Tim penggerak PKK kecamatan, sedangkan di desa disebut dengan Tim penggerak PKK Desa. Selain dari yang bertugas sebagai tim penggerak kader itu dikategorikan ke dalam Kader kelompok PKK RW/RT dan kader Dasawisma yang bertugas menggerakkan masyarakat ini. Di Kecamatan Luhak jumlah kader khusus PKK sebanyak 1020 orang yang terdiri dari :

- | | |
|----------------------|-----------|
| a. Fasilitator | 721 orang |
| b. Kader gizi | 213 orang |
| c. Kader kesehatan | 145 orang |
| d. Kader ketrampilan | 263 orang |
| e. Kader P2UKSS | 215 orang |
| f. Lain-lain | 65 orang |

Di Kecamatan Kapur IX kondisi di atas sedikit berbeda. Jumlah penduduk Kecamatan Kapur IX tahun 1987 adalah 16962 jiwa dengan luas data 722,32 km². Rata-rata kepadatan penduduk 23/km². Dalam kecamatan ini terdapat 25 desa dan 3694 kepala keluarga. Kedua puluh lima desa itu dikategorikan ke dalam :

- a. Desa Swadaya 7 buah
- b. Desa Swakarya 11 buah
- c. Desa Swasembada 7 buah

Oleh karena itu dalam Kecamatan Kapur IX terdapat 25 Tim Penggerak Desa dan satu Tim Penggerak PKK kecamatan. Jumlah anggota Tim Penggerak PKK desa sebanyak 100 orang dan kelompok PKK Dasa Wisma sebanyak 189 buah. Tempat kegiatan PKK sebanyak 189 buah dan kader khusus sebanyak 145 orang.

Di samping itu perlu pula dikemukakan bahwa dari 25 desa yang ada, baru 11 desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat. Apabila dibandingkan Kecamatan Luhak dan Kapur IX (dari data umum yang telah dikemukakan) dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Luhak lebih padat penduduknya dengan jumlah fasilitas yang lebih banyak pula dari pada Kecamatan Kapur IX. Tetapi kalau dilihat dari luas daerah maka Kecamatan Kapur IX lebih luas dari Kecamatan Luhak. Bahkan pada Kecamatan Kapur IX, 58254 Ha masih merupakan tanah kosong.

Secara kuantitas jumlah penduduk yang ada, fasilitas kantor (prasarana-sarana), jumlah kepala-kepala keluarga,

tutor, fasilitator dan kader khusus PKK ternyata juga lebih banyak di Kecamatan Lühak dari pada Kecamatan Kapur IX. Tetapi besarnya jumlah keluarga dalam satu PKK boleh dikatakan sama di antara kedua kecamatan tersebut.

Selanjutnya dapat pula diperhatikan keterlaksanaan program PKK tahun 1987/1988 seperti pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Keterlaksanaan Program PKK tahun 1987/1988 menurut Tim Penggerak, Kader dan Anggota PKK.

No.: Alternatif	Lühak		Kapur IX		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
1.: Kecil dari 50%	2	8,7	-	-	2	4,3
2.: 50% - 55%	9	39,2	-	-	9	19,6
3.: 60% - 69%	-	-	-	-	-	-
4.: 70% - 79%	10	43,4	8	34,8	18	39,1
5.: 80% - 89%	2	8,7	3	13,0	5	10,9
6.: 90 - ke atas	-	-	12	52,2	12	26,1
T o t a l	23	100,0	23	100,0	46	100,0

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa keterlaksanaan program yang disusun agak berbeda antara Kecamatan Luhak dan Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota. Pada Kecamatan Luhak 43,4% dari responden menyatakan bahwa keterlaksanaan program PKK yang telah disusunnya hanya antara 70 - 79% sedangkan 39,2% menyatakan antara 50 - 59%. Bahkan 8,7% menyatakan kecil dari 50%.

Sebaliknya di Kecamatan Kapur IX tingkat keterlaksanaan program sama dengan di atas 70%. Bahkan 52,2% dari responden berpendapat bahwa program-program yang telah disusun terlaksana 90% ke atas. Justru karena itu keterlaksanaan program yang ada pada tahun yang lalu jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kecamatan Luhak.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan program yang telah disusun pada tahun yang lalu di atas 69%.

Selanjutnya dapat pula kita perhatikan kegiatan PKK menurut bidang kelompok kerja PKK pada kedua kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bidang I : Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong.

1). Penghayatan dan pengamalan Pancasila

Dalam Kecamatan Luhak terdapat 115 buah kantor/tempat kegiatan yang melayani pelaksanaan program PKK. Di samping itu pada tiap-tiap kelom-

pok PKK Dasa Wisma masih ada tempat tertentu untuk melaksanakan kegiatan walaupun tidak semuanya mempunyai fasilitas khusus untuk kegiatan PKK.

Pengurus/Tim Penggerak PKK yang telah mengikuti penataran P4 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Tim Penggerak PKK Kecamatan Luhak yang Telah Mengikuti Panataran P4, Menurut Tim Penggerak Kecamatan.

No.	Pola Pendukung	Jumlah	Keterangan
1.	45 jam	28	
2.	25 jam	43	
3.	17 jam	863	
Jml.	87 jam	934	

Apabila jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah Tim Penggerak PKK kecamatan, maka hampir semua (96%) anggota Tim Penggerak PKK telah mengikuti penataran, walaupun mengikuti pola pendukung yang berbeda, sesuai dengan peraturan yang berlaku (sumber data 87/88). Jumlah fasilitas yang tersedia sebanyak 74 orang, dengan kelompok simulasi yang ada sebanyak 97 kelompok ini berarti tiap-tiap desa telah memiliki satu kelompok simulasi.

Di samping itu penyuluhan-penyuluhan/ceramah yang diadakan tentang P4 pada tahun 1987/1988 sebanyak 374 kali, sedangkan kelompok kerohanian pengajian yang ada sebanyak 426 buah. Secara kuantitas jumlah penyuluhan P4 masih terbatas yaitu antara tiga atau empat kali tiap desa selama satu tahun, sedangkan kelompok kerohanian empat atau lima kali tiap desa.

Di Kecamatan Kapur IX sesuai dengan jumlah desa yang relatif kecil (25 desa) jumlah kantor/tempat kegiatan program yang ada sebanyak 27 buah. Pelaksanaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila didukung oleh 15 orang fasilitator dan 13 buah kelompok simulasi. Di samping itu sudah ada 30 orang Tim Penggerak PKK yang telah mengikuti penataran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Apabila dibandingkan jumlah tersebut dengan jumlah desa dan penduduk yang akan mengikuti penataran, maka jumlah kelompok simulasi maupun fasilitator masih kurang, keempat belas buah desa belum mempunyai fasilitator yang dibina oleh PKK dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, bagi desa yang sudah adapun masih sangat kurang, karena hanya satu orang untuk satu desa kecuali desa Kampung Baru Muara Paiti, Kampung Dalam dan Desa Lubuk Alai. Keempat belas desa itupun belum

mempunyai kelompok simulasi.

Dalam Kecamatan Kapur IX ini, sangat sedikit sekali kelompok pengajian, kelompok kerohanian, penyuluhan undang-undang perkawinan dan penyuluhan P4.

Penataran P4 yang dikelola oleh Tim Penggerak PKK dalam pelaksanaannya menunggu instruksi dari atasan. Pada umumnya dilaksanakan di Kecamatan Kapur IX setahun dengan memperhatikan jumlah peminat dan bantuan anggaran untuk PKK.

Dalam setiap periode penataran terdapat perbedaan persepsi di antara responden pada kecamatan tersebut. Pada Kecamatan Luhak pelaksanaan penataran dilakukan dengan memilih hari-hari tertentu saja sedangkan pada Kecamatan Kapur IX disesuaikan dengan keadaan peserta namun pada kedua kecamatan itu tidak ada yang melakukan secara terus menerus. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Pelaksanaan Penataran P4, Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No.:	Alternatif	Luhak		Kapur IX		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%
1.:	Secara terus menerus	-	-	-	-	-	-
2.:	Dipilih hari-hari tertentu saja	21	91,3	5	21,7	26	56,6
3.:	Disesuaikan dengan peserta	2	8,7	18	78,3	20	43,4
T o t a l		23	100,0	23	100,0	46	100,0

Apabila dihubungkan dengan kehadiran peserta setiap kali penataran dapat dikemukakan bahwa di Kecamatan Luhak kehadiran peserta antara 75%-84%, sedangkan di Kecamatan Kapur IX adalah 95% ke atas. Oleh karena itu tingkat kehadiran peserta dalam penataran P4 pada Kecamatan Luhak lebih rendah dari Kecamatan Kapur IX.

Selanjutnya dapat dikemukakan manfaat penataran P4 bagi perubahan sikap, nilai dan pengalaman peserta. Semua kelompok respondent menyatakan manfaat penataran "banyak" dan sangat banyak terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan nilai pada peserta penataran seperti terlihat pada tabel 4.4. berikut ini.

Tabel 4.4. Manfaat Penataran P4 bagi Perubahan Sikap, Nilai dan Pengetahuan Peserta Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No.: Alternatif	Luhak		Kapur IX		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
1.: Sangat banyak	6	26,1	9	39,1	15	32,6
2.: Banyak	13	56,5	12	52,2	25	54,3
3.: Cukup	4	17,4	2	8,7	6	13,1
4.: Kurang	-	-	-	-	-	-
5.: Kurang sekali	-	-	-	-	-	-
6.: Belum pernah di-	-	-	-	-	-	-
T o t a l	23	100,0	23	100,0	46	100,0

Tidak ada responden yang menyatakan bahwa manfaat penataran P4 kurang terhadap perubahan sikap nilai dan pengetahuan peserta, bahkan 32,6% dari semua responden menyatakan sangat banyak manfaatnya dan 54,3% mengemukakan banyak manfaatnya.

Ini menunjukkan pula bahwa penataran P4 banyak manfaatnya bagi individu sebagai anggota masyarakat. Kegiatan gotong royong seperti kerja bakti, rukun kematian, baik di Kecamatan Luhak maupun di Kecamatan Kapur IX dilakukan secara teratur dengan memperhatikan keadaan lingkungan, kehadiran peserta pada setiap kali gotong royong di atas 60% dari 37% menyatakan bahwa peserta hadir 90% ke atas. Kehadiran itu tidak berdasarkan paksaan atau instruksi tetapi sukarela berdasarkan kesepakatan sebelumnya dan dalam penyampiannya digunakan cara beranting dari mulut ke mulut atau diumumkan pada tempat tertentu.

Apabila keadaan di atas dibandingkan dengan Kecamatan Luhak (daerah yang paling padat penduduknya ukuran standar Kabupaten 50 Kota), dibandingkan dengan Kecamatan Kapur IX, maka di daerah yang intra struktur lebih lengkap dan lebih banyak kegiatan PKK dalam Penghayatan dan Pengamalan Pancasila lebih baik dan lebih banyak kegiatannya.

2). Gotong royong

Berbagai usaha/aspek dikembangkan/diprogramkan oleh Tim Penggerak PKK Pusat untuk dilaksanakan dalam kelompok PKK baik di PKK dusun, RW, RT maupun Dasa Wisma. Di antara jenis gotong royong yang dilaksanakan pada Kecamatan Luhak dan Kapur IX, dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5. Jenis-jenis Kegiatan Gotong Royong yang Dilaksanakan oleh Kelompok PKK Tahun 1987/1988 Menurut Tim Penggerak PKK Kecamatan.

No.:	Jenis Kelompok	L u h a k		K a p u r IX		Ket.
		Jml.klpk.:	Ratio/desa:	Jml.klpk.:	Ratio/desa:	
1.:	Kerja bakti	635	1 : 6,3	64	1 : 2,56	
2.:	Rukun kemati-an	154	1 : 1,5	17	1 : 0,68	
3.:	A r i s a n	143	1 : 1,4	51	1 : 2	

Data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa tiap desa di Kecamatan Luhak memiliki antara enam sampai tujuh kelompok kerja bakti bersama wanita, yang ikut membantu secara bersama; memperbaiki rumah, pengumpulan pasir/batu untuk jalan atau memperhatikan kebersihan lingkungan desanya. Di samping itu pada tiap desa rata-rata akan didapati satu atau dua kelompok kegiatan muda mudi yang ikut membantu warga masyarakat dalam hal perkawinan, khitanan atau hajat lainnya.

Pada tiap desa dalam Kecamatan Luhak itu ditemui satu atau dua kelompok rukun kematian yang dimotori oleh PKK. Apabila ada keluarga yang tertimpa, maka kelompok PKK desa/Dasa Wisma berupaya meringankan/membantu keluarga tersebut.

Tidak kalah pentingnya peran serta kelompok arisan yang dimotori kelompok PKK dalam penyediaan fasilitas sesuai dengan 10 program pokok PKK, seperti arisan jendela, genteng, semen, pagar dan sebagainya. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa di Kecamatan Luhak jumlah kelompok kerja bakti rukun kematian dan arisan lebih banyak dibandingkan dari Kecamatan Kapur IX. Apabila dikaitkan dengan jumlah desa yang ada pada masing kecamatan, ternyata di Kecamatan Luhak ratio jumlah desa dengan jumlah kelompok kerja bakti 1 : 6,3, sedangkan di Kecamatan Kapur IX adalah 1 : 1,5; pada Kecamatan Luhak ada 1 : 0,68 untuk Kecamatan Kapur IX. Dalam kedua kegiatan itu ternyata kecamatan yang lebih banyak jumlah penduduknya, lebih lengkap infra strukturnya (termasuk sarana perhubungan) lebih mudah dan lebih banyak jumlah kelompok kegiatan yang ada. Hal itupun sangat terkait dengan ada/tidaknya kelompok PKK desa sebagai motor penggerak wanita di daerah itu.

Dalam hal kelompok arisan, ternyata Kecamatan

Kapur IX baik dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

b. Bidang II : Pendidikan ketrampilan dan koperasi.

1). Pendidikan dan ketrampilan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bidang pendidikan dan ketrampilan mencakup kursus belajar pengetahuan dasar (KRPD) yang mencakup :

- a). Paket A
- b). Kejar PKK
- c). Kejar usaha
- d). Pendidikan tambahan mata pencaharian (PMP)
- e). Kursus ketrampilan

Di samping itu juga dilaksanakan berbagai jenis koperasi seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi dan koperasi serba usaha. Dalam tahun 1987/1988 di Kecamatan Luhak jumlah kader khusus PKK sebanyak 1020 orang di antara jumlah itu terdapat 145 orang tutor paket A yang ikut berperan serta dalam memberantas tiga buta. Jumlah kelompok belajar paket A, jumlah warga belajar dan jumlah penduduk yang buta huruf adalah sebagai berikut :

**MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG**

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk yang Buta Huruf, Jumlah Warga Belajar Paket A di Kecamatan Luhak tahun 1987/1988, Menurut Tim Penggerak PKK Kecamatan.

No.	Data-data Penduduk Luhak	Jumlah	Ket.
1.	Penduduk yang masih buta huruf	1539	
2.	Warga belajar paket A	1578	
3.	Kelompok belajar	145	
		: 3262	:

Apabila jumlah penduduk yang buta huruf dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan itu 1539 : 13914, maka dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang masih buta huruf hanya 2% dari jumlah penduduk secara keseluruhan sedangkan jumlah kelompok belajar paket A sebanyak 153 buah dengan warga belajar yang dapat menyelesaikan programnya = 1578 orang. Ini berarti apabila semua kelompok belajar yang ada bergiat pada tahun 1988/1989, maka semua penduduk dalam kecamatan akan bebas dari buta huruf, lebih lagi jumlah tutor paket cukup banyak yang tersedia.

Kegiatan-kegiatan lain dalam kelompok belajar pengetahuan dasar yang dilaksanakan pada tahun

itu adalah kelompok kejar PKK, kejar usaha dan pendidikan tambahan. Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan menurut jenisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7. Jenis Pendidikan Ketrampilan yang Dilaksanakan di Kecamatan Luhak Tahun 1987/1988, Menurut Tim Penggerak PKK Kecamatan.

No. :	Jenis Ketrampilan :	Jumlah :	Ket.
1.	Kelompok kejar PKK	336	
2.	Kelompok kejar usaha	176	
3.	Kelompok pendidikan tambahan mata pencaharian	192	
Jumlah :		704	:

Tabel 4.7. menunjukkan pada kita dalam tahun 1987/1988 cukup banyak wanita-wanita di kecamatan ini yang mendapatkan pengetahuan tambahan tentang pendidikan kesejahteraan keluarga, yang mencakup unit kepribadian, tentang pangan dan perumahan/papan. Ditinjau dari perbandingan jumlah kelompok kejar PKK ternyata rata-rata untuk tiap desa memiliki antara dua dan tiga kelompok kejar PKK sedangkan untuk kejar usaha masing-masing desa memiliki antara satu sampai dua kelompok. Demikian

juga untuk pendidikan tambahan mata pencaharian. Di samping itu pada tiap-tiap desa dalam Kecamatan Luhak ini juga dilaksanakan bermacam-macam ketrampilan lainnya di bawah koordinasi Tim penggerak PKK. Selama tahun 1987/1988 peserta kursus (yang berijazah dan tidak berijazah) sebanyak 1179 orang.

Untuk menunjang program pendidikan dan ketrampilan dalam rangka mewujudkan anggota PKK dan setiap desa didirikan perpustakaan yang juga dibina oleh PKK. Jumlah perpustakaan yang tersedia sekarang ini sebanyak 93 buah lain berarti pula masih ada tujuh desa yang belum mempunyai perpustakaan desa yang dilaksanakan PKK.

Kegiatan koperasi juga dikembangkan oleh Tim penggerak PKK kecamatan dan desa dalam Kecamatan Luhak ini sampai dengan tahun 1987/1988 telah ada koperasi simpan pinjam sebanyak 74 buah. Berarti 74 buah dan dalam kecamatan telah memiliki koperasi simpan pinjam 36 dari seluruh desa belum memiliki koperasi.

Di Kecamatan Kapur IX jumlah penduduk yang masih mengalami tiga buta sebanyak 2962 orang, jumlah kelompok belajar paket A yang ada sebanyak 225 buah, sedangkan jumlah tutor 178 orang. Sampai dengan tahun 1988/1989 jumlah penduduk yang

mengalami tiga buta boleh dikatakan telah selesai mengikuti kursus belajar paket A di samping itu di kecamatan terdapat 18 taman bacaan untuk memperlancar warga masyarakat dalam meningkatkan pengetahuannya.

Berkenaan dengan kejar PKK, kejar usaha, dan kursus-kursus ketrampilan pada tahun yang lalu tidak banyak dilakukan. Untuk menunjang kehidupan berkoperasi di kecamatan ini terdapat 25 buah koperasi simpan pinjam. Kedua puluh lima koperasi tersebar pada beberapa desa yang dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat, sedangkan pada daerah-daerah yang belum lancar komunikasinya, koperasipun belum tumbuh dengan baik.

Apabila dibandingkan data di kedua kecamatan di atas dapat dikatakan bahwa kelengkapan jenis kegiatan yang tergabung dalam kelompok kerja pendidikan, ketrampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi, di kecamatan Lurah lebih banyak dibandingkan dari Kecamatan Kapur IX. Tetapi kalau dilihat dari 11 desa yang dilalui kendaraan beroda empat, maka Kecamatan Kapur IX dalam aspek-aspek tertentu tidak ketinggalan.

Pengembangan kehidupan berkoperasi juga mendapatkan perhatian dalam kegiatan PKK pada Kabupaten 50 Kota. Peran serta anggota masyarakat

dalam pengembangan kehidupan berkoperasi jauh berbeda antara Kecamatan Luhak dan Kapur IX, seperti terlihat pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8. Peran Serta Anggota Masyarakat dalam Pengembangan Koperasi Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No.:	Alternatif	Luhak		Kapur IX:		Jumlah:	
		f	%	f	%	f	%
1.:	Sangat besar	3	13,0	9	39,1	12	26,1
2.:	Besar	15	65,2	6	26,1	21	45,7
3.:	Cukup besar	5	21,8	5	21,8	10	21,7
4.:	Kurang	-	-	3	13,0	3	6,5
T o t a l		23	100,0	23	100,0	46	100,0

Pada Kecamatan Luhak semua responden menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pengembangan kehidupan berkoperasi hanya bervariasi antara sangat besar (13,0%), besar (65,2%) dan cukup besar (21,8%). Ini berarti bahwa tidak ada yang beranggapan kurang peran serta anggota masyarakat. Di Kecamatan Kapur IX (13,0) menyatakan peran masyarakat kurang, namun sebaliknya (39,1%) menyatakan sangat besar hal ini disebabkan bahwa kondisi masyarakat yang berbeda. Pada daerah yang lancar komunikasinya dan jalan telah baik peran serta masyarakat sangat besar, tetapi pada daerah yang masih terisolir karena jalan raya belum ada maka peran anggota masyarakat kurang dengan hal

pengembangan koperasi. Kalau pada daerah/desa di mana koperasi simpan pinjam sudah ada, maka pengembalian peninjauan oleh anggota berjalan dengan lancar (89,2%). Hanya 6,5% menyatakan kurang lancar dan 4,3% menyatakan belum ada pernyataan. Ketidakterlancaran pengembalian itu disebabkan karena kesehatan dalam mendapatkan uang untuk membayarnya, karena musim hujan yang panjang sehingga karet tidak bisa menghasilkan.

- c. Bidang III : Kelompok kerja bidang pangan, sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga.

Dalam bidang pangan usaha yang dikembangkan oleh Tim Penggerak PKK memberikan dorongan menuju makanan sehat. Di antara usaha-usaha yang pernah dilakukan adalah memberikan penyuluhan/penerangan tentang makanan sehat, melakukan peragaan tentang makanan sehat serta mengadakan lomba makanan sehat. Melalui cara yang demikian Tim Penggerak PKK kecamatan dan desa mengajak, membimbing dan menunjukkan makanan sehat sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan hidup dalam masyarakat yang harus tumbuh. Untuk meningkatkan makanan anggota dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan tanah pekarangan (halaman) dalam Kecamatan Luhak ini sebanyak 9165 kepala keluarga telah memanfaatkan

tanah pekarangan ini berarti 56,9 persen kepala keluarga telah memanfaatkan tanah pekarangan dan 43,1 persen belum memanfaatkannya.

Pada Kecamatan Kapur IX hanya sejumlah 166 kepala keluarga memanfaatkan tanah pekarangan, tiga puluh sembilan kepala keluarga memanfaatkannya untuk warung hidup dan 127 kepala keluarga menggunakannya untuk peternakan.

Secara keseluruhan baru 4,49% kepala keluarga yang memanfaatkan tanah pekarangan dan 95,51% masih belum menggunakannya untuk kegiatan yang bermanfaat dalam menunjang kesejahteraan keluarga.

Di samping memanfaatkan tanah pekarangan Tim Penggerak PKK pada Kecamatan Luhak dan Kapur IX juga membina dan mengembangkan usaha-usaha rumah tangga swadaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan industri rumah tangga swadaya yang dibina seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9. Industri Rumah Tangga Swadaya yang Dibina PKK pada Kecamatan Luhak dan Kapur IX tahun 1987/1988, Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No. :	Jenis	Luhak :Kapur IX				Ket.
		Jml.:	% :	Jml.:	% :	
1.	Makanan	21	0	-		
2.	Minuman	8		-		
3.	Konfeksi	34		-		
4.	Ketrampilan/Kerajinan	59		-		
5.	J a s a	-		21		
Jumlah:		122		21		

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Kapur IX sangat sedikit sekali industri rumah tangga swadaya (21 buah). Dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga yang ada di kecamatan ini, maka industri rumah tangga swadaya baru mencapai 0,56% sedangkan pada Kecamatan Luhak sebanyak 0,76%. Variasi industri rumah tangga yang ada lebih banyak pula di Kecamatan Luhak dari pada di Kecamatan Kapur IX.

Pembinaan rumah sehat yang memenuhi kriteria rumah sehat juga merupakan salah satu

kegiatan yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK pada tahun 1987/1988 di Kecamatan Luhak dan Kapur IX.

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Luhak ternyata 48,2% dari kepala keluarga menyediakan sumber air bersih dari sumur dan 28,8% dari PAM, yang paling sedikit dari sungai (6,1%). Pada Kecamatan Kapur IX, yang terbanyak kepala keluarga menyediakan sumber air bersih juga dari sumur (74,1%) dan yang kedua dari sungai (25,9%).

Dalam rangka meningkatkan kesehatan keluarga, di samping usaha yang telah dikemukakan terdahulu PKK juga melakukan penyuluhan kesehatan dan lingkungan serta perencanaan sehat.

Menurut kriteria PKK ada tiga klasifikasi desa, rumah sehat yaitu tipe A, B dan tipe C. Tipe A adalah rumah yang sehat, tipe B rumah yang cukup dan tipe C rumah yang perlu ditingkatkan. Jumlah rumah sehat yang ada pada kedua kecamatan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10. Jumlah Rumah Sehat pada Kecamatan
Luhak dan Kapur IX tahun 1987/1988
Menurut Tim Penggerak PKK Kecamatan.

No.:	Tipe:	L u h a k		Kapur IX		Ket.
		f	%	f	%	
1.	A	896	19,0	94	3,6	
2.	B	2372	50,1	1696	64,8	
3.	C	1463	30,9	827	31,6	
Jumlah :		4731	:100,0	:2617	:100,0	:

Pada Kecamatan Luhak rumah sehat sebanyak 19,0% sedangkan pada Kecamatan Kapur IX hanya sebanyak 3,6%, sebaliknya rumah dengan klasifikasi cukup, lebih banyak di Kecamatan Kapur IX (64,8%) dari pada Kecamatan Luhak (50,1%). Rumah yang perlu ditingkatkan (tipe C) pada kedua kecamatan hampir sama, yaitu 30,6% : 31,6%. Kondisi rumah tipe C yang perlu ditingkatkan itu antara lain berdinding batu, beratap genteng/seng/rumbia, lantai tanah/bambu/batu salah satu belum ada pembangian ruangan, belum ada jendela, keadaan lembab, belum ada kamar mandi dan WC dan halaman belum dimanfaatkan.

d. Bidang IV : Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Peningkatan kesehatan warga masyarakat melalui program PKK dilaksanakan pula melalui berbagai kegiatan antara lain dengan cara :

- a). Meningkatkan gizi masyarakat
- b). Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pos kesehatan
- c). Mendirikan jamban keluarga atau WC

Pada tahun 1987/1988 di Kecamatan Luhak terdapat 172 taman gizi, 101 pos KB, dan 33 Posyandu di mana anggota PKK berperan aktif di dalamnya. Apabila dibandingkan dengan jumlah desa yang ada, maka dapat dikatakan pada setiap desa akan ditemui antara satu atau dua taman gizi yang dapat digunakan untuk penimbangan anak balita.

Pos pelayanan terpadu yang ada masih cukup memadai dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memanfaatkan pada setiap desa. Posyandu yang ada sangat membantu warga masyarakat di samping Puskesmas yang ada di daerah masing-masing. Jumlah kader khusus kesehatan yang ikut membantu posyandu sebanyak 145 orang.

Di Kecamatan Kapur IX jumlah kader kesehatan yang ada sebanyak 45 orang, jumlah kader

KB sebanyak 90 orang dan jumlah posyandu yang ada sebanyak 28 buah dengan 2 - 4 kegiatan pada setiap posyandu tetapi tidak ada taman gizi sedangkan jumlah pos KB sebanyak 14 buah untuk Kecamatan Kapur IX. Posyandu dan pos KB yang ada hanya terfokus pada 11 desa yang agak maju, sedangkan pada desa yang komunikasi masih menggunakan jalan setapak, kegiatan-kegiatan KB dan kesehatan masih terbatas.

Pada Kecamatan Luhak terdapat 101 pos KB yang berfungsi untuk membantu membagikan alat-alat kontrasepsi kepada peserta KB. Apabila dibandingkan jumlah pos KB dengan akseptor KN maka pos KB yang ada sudah memakai yaitu 1:78 dan dapat pula dikatakan tiap desa telah mempunyai pos KB (100 : 101). Tabanas dan Taska serta tabungan pelajar/pramuka juga mendapat perhatian oleh Tim PKK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga di kecamatan ini. Jumlah warga yang memiliki Tabanas sebanyak 825 orang, Taska sebanyak 58 orang dan tabungan pelajar/pramuka sebanyak 672 orang. Kalau dikaitkan jumlah warga yang memiliki Tabanas dengan jumlah penduduk atau kepala keluarga yang ada dalam kecamatan ini maka peserta Tabanas relatif kecil. Kurang dari 10% warga

masyarakat yang menabung apabila dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga. Yang menabung Tabanas sangat sedikit sekali, Taska boleh dikatakan tidak ada; yang agak banyak berupa celengan di rumah.

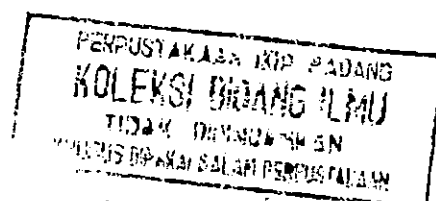
Dalam penyediaan air bersih, ternyata paling banyak menggunakan sumur sebagai sumber air bersih, tetapi masih ada dari kepala keluarga yang menggunakan sungai. Secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11. Persentase Penyediaan Air Bersih oleh Kepala Keluarga dalam Kecamatan Luhak dan Kapur IX tahun 1987/1988 Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No.:	Sumber Air	Luhak %	Kapur IX %	Ket.
1.	S u n g a i	6,1	25,9	
2.	Air hujan	16,9	-	
3.	S u m u r	48,2	74,1	
4.	P A M	28,8	-	
J u m l a h		100,0	100,0	

2. Relevansi program PKK

Seperti telah dikemukakan dalam uraian-uraian terdahulu bahwa 10 program pokok PKK adalah sama



untuk seluruh Indonesia, tetapi dalam penyusunan rencana program dan jenis kegiatan yang akan dilakukan, ditentukan oleh Tim Penggerak PKK propinsi/kabupaten atau kecamatan di daerahnya masing-masing.

Khusus di daerah Kecamatan Luhak dilakukan dengan jalan menghimpun semua tim penggerak PKK kecamatan, membentuk kelompok kerja penyusunan rencana dan pada akhirnya membicarakan secara bersama-sama hasil kelompok kerja itu.

Dalam penjabaran rencana program selalu memperhatikan rencana organisasi induk, keadaan setempat/kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan anggota dan fasilitas yang tersedia. Informasi-informasi dikumpulkan melalui temu ramah dengan pemimpin organisasi wanita, para tokoh wanita atau kerja personil lainnya.

Pada Kecamatan Kapur IX dalam menyusun rencana kegiatan menunggu rencana kegiatan induk organisasi dan kemudian menjabarkannya dalam kegiatan setempat dengan memperhatikan keadaan setempat.

Informasi-informasi dikumpulkan dari anggota tim penggerak PKK, para tokoh wanita maupun pimpinan organisasi wanita. Untuk daerah/desa yang transportasi belum lancar penyusunan rencana kegiatan lebih menekankan/memperhatikan kondisi desanya.

Dalam penyusunan rencana tersebut kader PKK dan

anggota PKK di desa masing-masing selalu diikutsertakan oleh Tim Penggerak PKK kecamatan seperti ditunjukkan oleh tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12. Keikutsertaan Kader dan Anggota PKK dalam Menyusun Rencana PKK, Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK;

No.: Alternatif	Luhak		Kapur IX		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
1. Selalu diikutsertakan	23	100	20	87,0	43	93,5
2. Sering kali diikutsertakan			2	8,7	2	4,3
3. Kadang-kadang diikutsertakan			1	4,3	1	2,2
4. Jarang diikutsertakan						
5. Tidak pernah diikutsertakan						
Jumlah : 23 : 100 : 23 : 100 : 46 : 100						

Dalam Kecamatan Luhak 100% kader PKK dan Anggota PKK ikut serta dalam menyusun rencana kegiatan PKK di daerah masing-masing, sedangkan di Kecamatan Kapur IX sedikit variasi. Pada daerah tertentu kadang-kadang diikutsertakan dan kadang tidak. Hal itu terjadi karena sulitnya komunikasi dan transportasi antar desa (untuk desa) dalam kecamatan ini.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kader PKK dan anggota selalu diikutsertakan dalam menyusun rencana kegiatan PKK di daerah masing-masing (93,5%). Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun rencana/program kegiatan pada tahun yang lampau dapat diperhatikan pada tabel 4.13. di bawah ini.

Tabel 4.13. Faktor yang Dipedomani dalam Menyusun Rencana Kegiatan PKK, Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No.:	Alternatif	Luhak		Kapur IX		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%
1.	Kebutuhan masyarakat	18	33,3	17	33,4	35	33,3
2.	Instruksi atasan	16	29,6	5	9,8	21	20
3.	Banyaknya peminat	2	3,7	7	13,7	9	8,6
4.	Fasilitas yang tersedia	9	16,7	13	25,5	22	21,0
5.	Biaya yang ada	5	9,3	5	9,8	10	9,5
6.	Jumlah kader yang ada	4	7,4	4	7,8	8	7,6
7.	Hal mendesak	-	-	-	-	-	-
Jumlah		54	100,0	51	100,0	105	100,0

Tabel di atas menunjukkan bahwa baik di Kecamatan Kapur IX, ketiga kelompok responden sependapat bahwa faktor utama yang dipedomani dalam menyusun rencana program adalah kebutuhan masyarakat (33,3%). Di samping itu untuk Kecamatan Luhak faktor yang perlu dipedomani adalah instruksi atasan dan kemudian adalah fasilitas yang tersedia.

Sedangkan untuk Kecamatan Kapur IX sedikit berbeda dari Kecamatan Luhak walaupun yang menjadi pertimbangan utama adalah kebutuhan masyarakat (33,4%), namun pertimbangan kedua adalah fasilitas yang tersedia (25,5%) dan kemudian diikuti dengan banyaknya peminat (13,7%). Kondisi yang demikian adalah wajar mengingat daerahnya yang luas, penduduknya yang jarang dan komunikasi serta transportasi untuk 14 desa yang belum lancar.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang diperhatikan dalam menyusun rencana kegiatan adalah kebutuhan masyarakat sehingga hasil kegiatan itu berguna bagi kehidupan masyarakat.

Dalam menentukan kegiatan mana yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada setiap desa, baik Tim Penggerak PKK, kader maupun anggota PKK sependapat bahwa kriteria utama yang digunakan adalah kebutuhan masyarakat/pembangunan. Selanjutnya di-

pertimbangkan pula fasilitas yang tersedia, tenaga yang ada dan sumber dana. Berkenaan dengan kesesuaian program PKK dengan kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4.14. Kesesuaian Program PKK dengan Kebutuhan Masyarakat Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No.:	Alternatif	Luhak		Kapur IX		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%
1.	Sangat sesuai	1	4,3	12	52,2	13	28,3
2.	Sesuai	22	95,7	10	43,3	32	69,6
3.	Kadang-kadang sesuai	-	-	1	4,3	1	2,1
4.	Kurang sesuai	-	-	-	-	-	-
5.	Tidak sesuai sama sekali	-	-	-	-	-	-
Jumlah		23	100,0	23	100,0	46	100,0

Pada Kecamatan Luhak tidak ada responden yang menyatakan bahwa program PKK yang dilaksanakan di Kecamatan itu kadang-kadang sesuai atau tidak sesuai sama sekali dengan kebutuhan. Mereka berpendapat bahwa program yang ada sesuai dan sangat sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat, sedangkan pada Kecamatan Kapur IX 52,2% menyatakan sangat sesuai namun 4,3% dari responden menyatakan kadang-kadang

sesuai. Dari uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa program yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat (69,6%).

Di antara bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menunjang pembinaan kesejahteraan keluarga menuju hidup sejahtera dan bahagia menurut bidang adalah sebagai berikut :

a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong royong.

1). Penataran P4, diskusi P4, permainan simulasi P4.

2). Wirid pengajian

3). Wirid remaja

4). Gotong royong membersihkan desa, mesjid, sekolah dan jalan di Dasa Wisma

5). Arisan

6). Membuat taman lintas raya

b. Bidang Pendidikan dan Koperasi.

1). Penataran ketrampilan rumah tangga seperti ketrampilan menjahit, belajar memasak, paket A dan KBU, pendidikan kesenian, olahraga dan PKK.

2). Koperasi simpan pinjam, serba usaha, konsumsi dan arisan.

c. Bidang Sandang, Pangan dan Papan yaitu :

- 1). Cara berpakaian yang sederhana
- 2). Makanan sederhana tetapi bergizi
- 3). Demonstrasi empat sehat lima sempurna
- 4). Penyuluhan rumah sehat
- 5). Arisan bahan bangunan untuk perumahan
- 6). Membuat batu bata

d. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, antara lain :

- 1). Melaksanakan Posyandu, KIA dan immunisasi penanggulangan diare.
- 2). Mengajukan pemanfaatan, tanah pekarangan, apotik hidup dan KB
- 3). Kebersihan lingkungan/K3, dan MCK
- 4). Taman gizi
- 5). Menata tanah pekarangan, membuat kolam ikan, kebun dan beternak ayam
- 6). Mengadakan penyuluhan, Undang-Undang perkawinan

Beberapa kegiatan yang relevan, tetapi kurang banyak pesertanya adalah; (1) memeriksakan kesehatan ke klinik, (2) home industri seperti jahit menjahit, membuat keping, (3) kesenian dan olahraga, dan (4) koperasi.

Sebaliknya ada beberapa kegiatan yang telah diprogramkan namun dianggap kurang cocok untuk

meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah warung PKK. Hal ini mungkin terjadi karena warung PKK yang ada kurang seimbang dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya belum dirasakan dengan pasti karena disaingi oleh warung keluarga yang tidak dibina PKK. Sedangkan kegiatan PKK yang lain cocok untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dari sekian banyak kegiatan yang pernah dilakukan tahun 1987/1988, relevan tidaknya terhadap kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini.

Tabel 4.15. Relevan/Tidaknya Kegiatan Gotong Royong dengan Kebutuhan Masyarakat, Menurut Tim Penggerak PKK, Kader, dan Anggota PKK.

No.: Jenis Kegiatan	Sangat	Relevan	Kurang	Tidak	Jumlah
	relevan	Relevan	relevan	relevan	
	f : %	f : %	f : %	f : %	f : %
1.: Kerja bakti	:25:54,3	:19:41,3	: 2: 4,4	:- : -	:46:100,0
2.: Rukun kematian	:37:80,4	: 9:19,6	:- : -	:- : -	:46:100,0
3.: A r i s a n	:24:52,2	:21:45,6	: 1: 2,2	:- : -	:46:100,0
4.: J e m p i t a n	:16:34,8	:20:43,5	: 7:15,2	:3 :6,5	:46:100,0

Dari tabel 4.15 dapat disimpulkan bahwa kegiatan kerja bakti, rukun kematian, arisan, dan jempitan adalah kegiatan gotong royong yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Luhak dan Kapur IX karena untuk kegiatan kerja bakti hanya 4,4% yang menyatakan kurang relevan, sedangkan untuk kegiatan arisan hanya 2,2%. Namun untuk kegiatan jempitan yang menyatakan kurang relevan 15,2% dan tidak relevan 6,5%.

Pernyataan responden itu menunjukkan bahwa pada daerah tertentu kegiatan jempitan kurang menunjang kebutuhan masyarakat, karena sumbangannya tidak begitu besar dan nyata bahkan pada desa tertentu, toh dilakukan oleh warga masyarakat. Kalau dikaitkan dengan jenis sumbangan yang diberikan oleh kegiatan gotong royong itu dalam peningkatan kesejahteraan anggota dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini.

Tabel 4.16. Manfaat Gotong Royong Terhadap Kesejahteraan Anggota Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No.:	Manfaat Gotong Royong	f	%
1.	Dapat membantu ekonomi keluarga	22	13,4
2.	Mengembangkan sikap kebersamaan	30	18,3
3.	Memupuk sikap kesetiakawanan	24	14,6
4.	Memupuk sikap saling bantu-membantu	33	20,2
5.	Menanamkan rasa keterikatan sosial	30	18,3
6.	Memupuk rasa percaya diri	25	15,2
J u m l a h		:164	:100,0

Dari tabel 4.16 dapat disimpulkan bahwa manfaat utama dari gotong royong adalah memupuk sikap saling membantu (20,2%) dan kemudian melalui gotong royong dapat ditanamkan rasa keterikatan sosial di antara peserta baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Di samping itu gotong royong yang dibina oleh kelompok PKK dapat pula mengembangkan sikap kebersamaan (18,3%) di antara anggota yang ikut dalam gotong royong itu.

Oleh karena itu gotong royong dengan bermacam-macam kegiatan seperti telah dikemukakan pada tabel

4.16 sangat bermanfaat untuk dikembangkan pada masa berikutnya. Namun dalam memilih jenis kegiatannya hendaklah pula diperhatikan keadaan, fasilitas dan komunikasi di daerah itu.

Dalam tahun 1988 jenis pendidikan dan ketrampilan yang dilaksanakan berbeda antara Kecamatan Luhak dan Kapur IX. Di Kecamatan Luhak jenis pendidikan dan ketrampilan yang dilakukan adalah :

- a. Paket A
- b. Kelompok belajar PKK
- c. Kelompok belajar usaha
- d. Kursus ketrampilan
- e. Latihan kader umum
- f. Latihan khusus

Sedangkan antar desa dalam Kecamatan Luhak juga bervariasi. Yang tidak dilaksanakan adalah kursus perpustakaan. Di Kecamatan Kapur IX hanya lima jenis yaitu :

- a. Paket A
- b. Kelompok belajar PKK
- c. Kursus ketrampilan
- d. Latihan kader umum
5. Latihan kader khusus

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antar desa dalam Kecamatan Kapur IX juga berbeda-beda seperti dalam Kecamatan Luhak. Ini berarti tidak semua desa dalam

Kecamatan Luhak dan Kapur IX melakukan ke enam atau ke lima jenis ketrampilan itu, ada desa yang melakukan keenam jenis itu, tetapi ada pula yang melaksanakan empat atau lima jenis kegiatan.

Kalau hal itu dikaitkan dengan anggota PKK yang mengikuti jenis-jenis kegiatan-kegiatan yang tidak diikuti sama sekali adalah kursus perpustakaan untuk Kecamatan Luhak. Pada Kecamatan Kapur IX kelompok belajar usaha dan kursus perpustakaan juga tidak diikuti oleh anggota PKK. Di samping itu paket A, juga tidak banyak yang mengikutinya (40%). Tentang kesesuaian materi yang diberikan pada setiap kegiatan dalam bidang pendidikan dan ketrampilan dengan kebutuhan masyarakat dapat diperhatikan pada tabel 4.17 di bawah ini.

Tabel 4.17. Kesesuaian Materi Kegiatan dengan Kebutuhan Masyarakat Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No.:	Jenis Kegiatan	Sangat	Sesuai	Kurang	Tidak	Jumlah
		sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	
		f : %	f : %	f : %	f : %	f : %
1.:	Paket A	15:32,6	22:47,8	4 : 8,7	15:10,9	46:100,0
2.:	P K K	22:47,8	24:52,2	- : -	- : -	46:100,0
3.:	U s a h a	4 : 8,7	41:89,1	1:1	2,2: -	46:100,0
4.:	Kursus ketrampilan	17:37,0	27:58,7	2 : 4,3	- : -	46:100,0

Dari tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa materi dari keempat jenis program Paket A, kelompok belajar PKK, kelompok belajar usaha dan kursus ke-trampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun untuk Paket A 19,6% dari responden menyatakan Paket A kurang/tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sedangkan untuk paket belajar usaha 2,2% responden menyatakan ketidak sesuaian materi dengan kebutuhan masyarakat. Untuk materi ketrampilan masih ada 4,3% responden yang menyatakan materi kurang sesuai.

Sedangkan untuk kelompok belajar usaha dan kursus ke-trampilan, hanya sedikit responden yang menyatakan materi yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan Paket A, fasilitas yang digunakan boleh dikatakan cukup, tetapi barang/fasilitas yang digunakan itu sebagian lagi meminjam pada Depdikbud kecamatan sedangkan untuk PKK sebagian besar alat buku, bahan praktikum, keuangan dan tutor adalah untuk tim PKK dan sebagai pelengkap adalah milik anggota tetapi tidak ada alat dan fasilitas yang disewa. Untuk kelompok usaha perlengkapan dan fasilitas yang digunakan kurang mencukupi, walaupun pada daerah tertentu di Kecamatan Luhak mempunyai fasilitas cukup dan milik sendiri.

Relevansi pengembangan kehidupan berkoperasi dengan kebutuhan masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 4.18. Relevansi Pengembangan Kehidupan Berkoperasi dengan Kebutuhan Masyarakat Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No. : J e n i s K o p e r a s i	Sangat relevan	Relevan	Kurang relevan	Jumlah
	:f : %	:f : %	:f : %	:f : %
1. : Koperasi simpan pinjam	:18:39,2	:26:56,5	:3:4,3	:46:100,0
2. : Koperasi serba usaha	:10:21,8	:18:39,1	:17:37,1	:46:100,0
3. : Koperasi usaha bersama	:7:15,2	:36:78,3	:3:6,5	:46:100,0

Kalau diperhatikan tabel 4.18 di atas maka koperasi yang sangat relevan di antara ketiga koperasi itu dengan kebutuhan masyarakat adalah koperasi simpan pinjam (39,1%), sedangkan yang kurang relevan adalah koperasi serba usaha (37,1%). Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan koperasi simpan pinjam dan koperasi usaha bersama lebih relevan terhadap kebutuhan masyarakat dibandingkan koperasi serba usaha.

Di samping koperasi berbagai usaha lain seperti pemanfaatan tanah pekarangan, usaha rumah swadaya dan warung PKK telah dilakukan. Jumlah-jumlah tiap jenis itu secara terinci telah dikemukakan pada bagian

data umum dan kegiatan PKK. Manfaat warung hidup, apotik hidup dan berternak bagi anggota masyarakat adalah; (a) membantu kesejahteraan keluarga, (b) menambah pendapatan keluarga. Di samping itu pemanfaatan tanah pekarangan tidak mengurangi tempat anak-anak bermain dan juga tidak mengabulkan Ibu rumah tangga.

Usaha rumah tangga swadaya yang telah dikembangkan tim PKK seperti makanan, konfeksi, kerajinan dan jasa bermanfaat sekali untuk; (a) meningkatkan income keluarga, (b) mendukung gagasan pemerintah, (c) membantu kesejahteraan masyarakat dan (d) mengurangi pengangguran. Berkenaan dengan manfaat warung keluarga untuk kesejahteraan masyarakat dapat diperhatikan pada tabel 4.19 berikut ini.

Tabel 4.19. Manfaat Warung PKK Menurut Tim Penggerak, Kader dan Anggota PKK.

No. : Alternatif	Luhak		Kapur IX		Jumlah	
	f	%	f	%	f	%
1. Sangat besar	-	-	2	8,7	2	4,3
2. Besar	5	21,7	3	13,0	8	17,4
3. Cukup	7	30,4	4	17,4	11	23,9
4. Kurang	11	47,9	14	60,9	25	54,4
5. Tidak berarti sama sekali	-	-	-	-	-	-
Jumlah	: 23	: 100,0	: 23	: 100,0	: 46	: 100,0

Dari tabel 4.19 dapat disimpulkan bahwa warung PKK kurang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (54,4%) bahkan dalam Kecamatan Kapur IX persentase yang menyatakan kurang, jauh lebih tinggi dari pada dari Kecamatan Luhak (60,9% : 47,9%). Manfaat itu mungkin belum dirasakan karena warung PKK dan usaha rumah tangga swadaya itu yang ada kurang seimbang dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.20. Keseimbangan Warung PKK dan Usaha Rumah Tangga Swadaya dengan Jumlah Keluarga Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No.:	K e g i a t a n	:Seimbang		:Kurang		:Tidakse:		:Jumlah	
		:f	:%	:f	:%	:f	:%	:f	:%
1.:	Warung keluarga	14	30,4	19	41,3	13	28,3	46	100,0
2.:	Usaha Swadaya keluarga	15	32,6	20	43,5	11	23,9	46	100,0

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa 69,6% dari pada responden menyatakan bahwa warung keluarga kurang seimbang dan tidak seimbang dengan jumlah keluarga, hal yang hampir sama juga terjadi pada usaha swadaya keluarga ternyata selisih persentase kedua kegiatan sangat kecil, sehingga tidak terdapat perbedaan

yang berarti.

Selanjutnya dapat pula dikemukakan tentang manfaat kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan. Manfaat kegiatan penyuluhan, sandang, pangan dan papan adalah :

a. Telah mampu meningkatkan kehidupan keluarga ke arah yang lebih baik.

Dari sisi lain dapat pula dikatakan kompleksitas program yang dilaksanakan dalam PKK tidaklah dapat dipisahkan dari tingkat kemajuan dari desa serta pelaksanaan di daerah itu. Makin maju desa makin maju pula PKKnya, karena kepala desa adalah pembina dan isteri kepala desa ketua Tim Penggerak PKK desa.

Apabila hasil penelitian yang telah dilakukan, terutama sekali tabel 4.4, 4.14, 4.15, 4.17, 4.18 dan 4.21 dihubungkan dengan hipotesis yang berbunyi "Tidak terdapat relevansi antara program PKK dengan kebutuhan masyarakat", maka hipotesis ditolak. Penolakan itu dilakukan setelah memperhatikan tingkat persentase yang ada pada masing-masing tabel itu menyatakan bahwa program PKK yang diberikan kepada masyarakat relevan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Mendorong keluarga meningkatkan pendapatan/income keluarga.

- c. Merangsang keluarga untuk hidup sederhana dan sehat.
- d. Mendorong keluarga untuk memperbaiki cara hidup sehari-hari.

Jenis-jenis pelayanan yang dilakukan Posyandu dan KB terhadap kebutuhan masyarakat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 4.21 berikut ini.

Tabel 4.21. Relevan Jenis Kegiatan Posyandu dan KB Terhadap Kebutuhan Masyarakat Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No.:	Jenis Kegiatan	:Sangat Relevan:		:Relevan:		:Kurang Relevan:		: Jumlah
		:f:	: %	:f:	: %	:f:	: %	
1.:	Immunisasi	:21:	:45,7:	:25:	:54,3:	-	: -	:46 :100,0
2.:	Peningkatan Gizi	:20:	:43,4:	:26:	:56,6:	-	: -	:46 :100,0
3.:	K I A	:19:	:41,3:	:27:	:58,7:	-	: -	:46 :100,0
4.:	Penanggulangan diare	:23:	:50,0:	:23:	:50,0:	-	: -	: 46 :100,0
5.:	Keluarga Berencana	:25:	:54,3:	:21:	:45,7:	-	: -	:46 :100,0

Kalau dibandingkan kelima jenis kegiatan pada tabel 4.21, ternyata yang sangat relevan dibandingkan dari yang lain adalah pelayanan KB. Minat masyarakat terhadap perlunya memiliki tabungan untuk Kecamatan Lurah bervariasi dari sangat besar, besar dengan cukup 60% dari responden menyatakan bahwa

anggota masyarakat mempunyai minat besar terhadap jumlah untuk memiliki tabungan, sedangkan di Kecamatan Kapur IX 78,3% mempunyai minat sangat besar untuk memiliki tabungan.

Selanjutnya dapat pula dikemukakan peranan tabungan masyarakat terhadap kesejahteraan keluarga/anggota masyarakat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.22. Peranan Tabungan Masyarakat bagi Kesejahteraan Keluarga Menurut Tim Penggerak PKK, Kader dan Anggota PKK.

No.:	Peranan	Luhak		Kapur IX		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%
1.	Sangat berarti	6	26,1	20	87,0	26	56,5
2.	Berarti	14	60,9	2	8,7	16	34,8
3.	Cukup berarti	3	13,0	-	-	3	6,5
4.	Kurang berarti	-	-	1	4,3	1	2,2
5.	Tidak berarti sama sekali	-	-	-	-	-	-
T o t a l		: 23	:100,0	: 23	:100,0	: 46	:100,0

Untuk Kecamatan Luhak, 60,9% dari responden berkesimpulan bahwa peranan tabungan "berarti" bagi kesejahteraan keluarga, sedangkan di Kecamatan Kapur IX, 87,0% menyatakan peranannya sangat berarti.

Secara keseluruhan dapat dikatakan pada kedua kecamatan ini peranan tabungan sangat berarti (56,5%) dan berarti (34,8%) bagi kesejahteraan anggota masyarakat. Jenis tabungan yang banyak diikuti oleh anggota keluarga/masyarakat adalah tabanas dan simpedes.

Jenis-jenis penyuluhan lainnya jelas dilakukan adalah penyuluhan kesehatan KIH dan perencanaan sehat seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu jenis-jenis penyuluhan KIH, kesehatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Ya = 97,8% dan tidak = 2,2%).

Jenis penyuluhan yang dilakukan pada waktu lalu adalah :

a. Penyuluhan kesehatan

- 1). Penyuluhan tentang Posyandu, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, KIA, pemberantasan diare, taman gizi, cara membuat oralit dan sanitasi.

b. Penyuluhan KIH ; penyuluhan penanaman tanah perkarangan (apotik hidup, warung hidup).

c. Perencanaan sehat; penyuluhan KB dan P2WKSS, gizi keluarga/makanan bergizi.

Keberhasilan pelaksanaan program PKK tahun yang lalu tidaklah dapat dipisahkan dari keterlibatan Tim Penggerak PKK desa dan kecamatan dalam

mendorong, membina, mengarahkan dan membimbing anggota PKK. Kehadiran Tim Penggerak desa dan kecamatan, pada tahun 1980 dapat dikategorikan "cukup", kehadiran Tim Penggerak PKK desa jauh lebih banyak dari Tim Penggerak PKK kecamatan.

B. Pembahasan

Penjabaran program PKK seperti yang telah diungkapkan dalam hasil penelitian bervariasi sesuai dengan infra struktur/fasilitas, sarana, dana, dan manusia serta kondisi lingkungan, namun tetap dalam rentangan 10 program pokok PKK yang telah ditetapkan secara nasional.

Keseragaman itu sangat terkait dengan kebutuhan pembangunan yang menyeluruh, terutama sekali pembangunan masyarakat desa, di mana individu dan masyarakat desa merupakan titik sentralnya tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa wanita-wanita desa secara potensial tidaklah berbeda dengan pria dalam memberikan sumbangannya dalam pembangunan, kecuali menurut kodratnya yang berlainan. Namun di masa lampau (sebelum adanya PKK) pendidikan ketrampilan dan peran serta mereka kurang mendapat perhatian dalam pembangunan, justru karena itu adalah wajar kalau wanita-wanita desa belum menampakkan sumbangan yang sangat berarti lagi pembangunan masyarakat desa.

Walaupun program PKK telah dirancang secara nasional dan dilakukan pada semua tingkat pemerintahan (pusat, propinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan dan desa, tetapi dalam pelaksanaannya juga bervariasi pula.

Hal itu terjadi karena dalam pelaksanaan program menuntut keterlibatan berbagai sektor yang terkait dalam program itu, sedangkan PKK hanya merupakan motor penggeraknya dan jumlah kader yang ada masih terbatas. Demikian juga dari segi kualitasnya.

Dalam bidang penataran P4 PKK dapat mengambil inisiatif untuk melakukan kegiatan bagi anggota masyarakat. Tetapi tutor yang mereka miliki terbatas, dana yang ada sangat minim, mereka juga membutuhkan tenaga pendamping dari BP7 atau instansi lainnya yang mempunyai kewenangan diikut sertakan. Karena itu di daerah tertentu di mana fasilitas kesehatan belum memadai, kegiatan PKKpun tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian peranan instansi yang terkait dengan program PKK akan menentukan pula keberhasilan program PKK di desa itu; karena ia menyangkut lapisan masyarakat yang paling bawah yaitu masyarakat desa.

Di daerah yang relatif jarang penduduknya dengan jumlah tenaga kerja produktif relatif kecil dan kondisi daerah yang belum terbuka secara utuh maka adalah wajar kalau program PKK yang direncanakan tidak berja-

lan semestinya. Daerah seperti itu lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan atau kegiatan lain yang lebih mengutamakan nilai ekonomis dari suatu kegiatan. Mereka masih berpacu antara pemenuhan kebutuhan primer dengan pemancangan tonggak penyangga untuk pembangunan masyarakat.

Mereka masih mengutamakan peningkatan income sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya. Bahkan pada daerah terisolir ini pendidikan melalui Paket A, warung PKK, usaha swadaya keluarga masih sangat bervariasi sekali. Karena mereka melihat bagaimana sumbangan secara langsung bagi kebutuhan kehidupannya. Tetapi kegiatan seperti gotong royong, arisan/celengan, pemanfaatan tanah pekarangan, koperasi simpan pinjam mendapat prioritas dalam pelaksanaannya karena mereka melihat langsung perannya bagi dirinya dan masyarakat. Tetapi sebaliknya perlu pula mendapat perhatian bahwa pendidikan yang kurang tidak dapat pula memacu anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Pada daerah yang agak padat penduduknya lebih terbuka daerahnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis dan jumlah PKK lebih banyak dibandingkan daerah terisolir dan belum maju. Dari satu sisi kita melihat bahwa kegiatan PKK menunjang pembangunan masyarakat desa, menggerakkan masyarakat dan memotivasi warga masyarakat. Untuk itu, di lain pihak mereka juga harus menunggu

kebijaksanaan dari atasan dan tuntutan dari masyarakat.

Hal yang sama juga berlaku pada kejar paket A, PKK maupun penyuluhan kesehatan. Dalam hal kejar paket A, Kandep P & K kecamatan melalui penilik pendidikan masyarakat, juga mempunyai kewenangan dalam hal penanganan tiga buta di wilayahnya. Mereka memiliki program-program tertentu sesuai dengan anggaran, waktu dan tenaga yang ada pada unitnya, karena itu PKK sebagai penggerak wanita di desanya hendaklah bekerjasama dengan mengadakan program terpadu. Terjadi variasi program paket A di berbagai sumber dari ketidak terpaduan program yang antar unit pada tingkat yang paling bawah. Pada daerah tertentu kejar paket A dilaksanakan dan pada daerah lain tidak. Sedangkan dari sisi PKK, pada daerah yang tidak dikembangkan sebenarnya adalah esensial untuk dilaksanakan.

Demikian juga untuk kesehatan keluarga berencana. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Ibu dan anak serta taraf kehidupan masyarakat desa bukanlah semata-mata dapat dilakukan oleh PKK tanpa bantuan dari para medis lainnya melalui usaha terpadu antar unit dalam pembangunan. Posyandu tidak dapat berjalan sendirian oleh kader PKK khusus karena mereka membutuhkan bantuan tenaga medis lain. Pos KB hanya akan berfungsi untuk membagikan alat-alat kontrasepsi, sedangkan pelayanan medis khusus hanya dimungkinkan kalau ada tenaga

kesehatan trampil. Kekurang lancarān pada daerah tertentu karena program yang tidak menyatu dan prioritas yang berbeda antar unit departemen yang terkait di pedesaan. Melalui program KB yang berintegrasi antar PKK dengan Departemen Kesehatan, kesehatan Ibu dan anak dapat terjamin.

Dalam kenyataan tenaga medis dari khusus PKK, masih terbatas kemampuannya sedangkan dari unit lain masih terbatas jumlah yang mungkin dari sisi lain dapat pula dikatakan kompleksitas program yang dilaksanakan dalam PKK tidaklah dapat dipisahkan dari tingkat kemajuan desa, infra struktur dan fasilitas di desa itu. Tidak kalah pentingnya kualitas individu pelaksana dari Tim Penggerak di desa tersebut. Makin maju desa makin maju pula PKKnya, karena kepala desa adalah pembina PKK dan isteri kepala desa Ketua Tim Penggerak PKK desa.

Apabila dikaitkan hasil penelitian dengan hipotesis "Tidak terdapat relevansi antara program PKK dengan kebutuhan masyarakat", maka hipotesis tersebut ditolak. Pertimbangan-pertimbangan penolakan itu adalah sebagai berikut :

1. Dari tabel 4.4 disimpulkan bahwa penataran P4 banyak gunanya (77,5%) dalam mengembangkan diri individu baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui penataran P4 dapat ditingkatkan pe-

ngetahuan, nilai dan sikap para anggota masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. Oleh karena itu apa yang diberikan dalam penataran P4 relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat desa dewasa ini.

2. Dari tabel 4.14 disimpulkan, bahwa 69,6% menyatakan program PKK sesuai dan 28,3% menyatakan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hanya 4,4% yang menyatakan kerja bakti kurang relevan, 2,2% menyatakan arisan kurang relevan, dan 21,7% jempitan kurang/tidak relevan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program PKK dalam segi gotong royong relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Tabel 4.17 memberi informasi bahwa :
 - a. Hanya 19,6% yang menyatakan paket A kurang sesuai materinya dengan kebutuhan masyarakat atau 80,4% menyatakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. Semua responden sependapat bahwa materi PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - c. Sedangkan untuk kegiatan "usaha" 97,8% menyatakan materinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - d. Untuk kursus ketrampilan 95,7% menyatakan materi yang diberikan sesuai/sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa materi yang diberikan dalam bidang pendidikan dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Tabel 4.18 dengan kesimpulan bahwa pengembangan kehidupan berkoperasi (koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha dan koperasi usaha bersama) relevan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Dari tabel 4.21 disimpulkan bahwa semua jenis kegiatan Posyandu dan KB (immunisasi, peningkatan gizi, KIA, penanggulangan diare, dan KB) relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa program-program yang dilaksanakan dalam kegiatan PKK sangat berarti, relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut menunjang pengembangan diri pribadi (pengetahuan, nilai dan sikap) dan juga memenuhi kebutuhan dasar setiap individu sebagai anggota masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Di Kecamatan Luhak terdapat 100 Tim Penggerak PKK desa dengan 10119 kelompok PKK Dasa Wisma, sedangkan di Kecamatan Kapur IX terdapat 25 Tim Penggerak PKK desa, dengan 189 buah kelompok PKK Dasa Wisma. Dalam pelaksanaan kegiatan PKK, Tim Penggerak PKK dibantu oleh kader khusus PKK. Di Kecamatan Luhak terdapat 1020 orang kader khusus PKK, sedangkan pada Kecamatan Kapur IX hanya 145 orang.
2. Sepuluh program pokok PKK yang dikelompokkan ke dalam empat bidang yaitu :
 - a. Bidang I : - Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- Gotong royong.
 - b. Bidang II : Pendidikan ketrampilan dan koperasi.
 - c. Bidang III : Pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. Bidang IV : Kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.
3. Hampir semua anggota Tim Penggerak PKK di Kecamatan Luhak telah mengikuti penataran P4, sedangkan di Kecamatan Kapur IX baru sebagian yang mengikuti penataran P4.

4. Kalau dikaitkan dengan jumlah kepala keluarga pada tiap kecamatan, maka jumlah kelompok kerja bakti, dan rukun kematian lebih di Kecamatan Luhak dari pada di Kecamatan Kapur IX.
Sedangkan dalam hal arisan, rukun kematian jumlah kelompok dengan kepala keluarga, lebih tinggi pada Kecamatan Kapur IX dari pada Kecamatan Luhak.
5. Pada tahun 1987/1988 di Kecamatan Luhak dilaksanakan kelompok belajar Paket A, kejar PKK, kejar usaha dan pendidikan tambahan mata pencaharian, pada Kecamatan Kapur IX hanya dilaksanakan kejar paket A.
6. Tanah pekarangan telah dimanfaatkan oleh sebagian kepala keluarga di Kecamatan Luhak, sedangkan di Kecamatan Kapur IX baru sebagian kecil yang memanfaatkannya untuk warung hidup dan apotik hidup.
7. PKK Kecamatan Luhak juga telah membina industri rumah tangga swadaya seperti makanan, minuman dan konfeksi, sedangkan pada Kecamatan Kapur IX yang baru dibina adalah jasa.
8. Jumlah rumah yang perlu ditingkatkan (tipe C) lebih banyak di Kecamatan Luhak dari pada di Kecamatan Kapur IX tetapi secara persentase hampir sama pada kedua kecamatan itu.
9. Sumber air bersih yang banyak digunakan oleh kepala keluarga adalah sumur, namun pada Kecamatan Kapur IX, sungai merupakan sumber air bersih kedua yang selalu dimanfaatkan.

10. Dalam penyusunan rencana kegiatan PKK, kader dan anggota PKK selalu diikuti sertakan oleh Tim Penggerak PKK.
11. Faktor utama yang diperhatikan dalam penyusunan rencana adalah kebutuhan masyarakat. Sedangkan faktor kedua untuk Kecamatan Luhak adalah instruksi atas-an dan pada Kecamatan Kapur IX adalah fasilitas yang tersedia.
12. Program PKK yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
13. Keterlaksanaan program yang telah disusun bervariasi antara Kecamatan Luhak dan Kapur IX. Di Kecamatan Luhak persentase terbesar adalah 70% - 79% ; sedangkan di Kecamatan Kapur IX 90% ke atas.
14. Pelaksanaan penataran P4 untuk Kecamatan Luhak pada hari tertentu saja, sedangkan Kecamatan Kapur IX disesuaikan dengan keadaan peserta.
15. Manfaat penataran P4 banyak untuk perubahan sikap, nilai dan pengetahuan peserta.
16. Kegiatan gotong royong (kerja bakti, rukun kematian, arisan jempitan) relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sangat bermanfaat terhadap kesejahteraan anggota.
17. Kejar Paket A, kejar PKK, kejar usaha dan kursus ketrampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
18. Di Kecamatan Luhak peran serta anggota masyarakat

besar terhadap pengembangan kehidupan berkoperasi sedangkan Kecamatan Kapur IX bervariasi kurang sampai sangat besar.

19. Koperasi simpan pinjam dan koperasi usaha bersama relevan dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan koperasi serba usaha kurang relevan.
20. Manfaat warung PKK kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan jumlah yang ada kurang seimbang dengan jumlah keluarga yang ada pada kedua kecamatan itu.
21. Kegiatan-kegiatan Posyandu, seperti immunisasi, peningkatan gizi, KIA, penanggulangan diare dan KB sangat relevan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
22. Tabungan (Tabanas) sangat berarti bagi Kecamatan Kapur IX dan berarti bagi Kecamatan Luhak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temua-temuan hasil penelitian di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan program PKK hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan fasilitas yang tersedia pada desa.
2. Kebutuhan masyarakat hendaklah dijadikan pertimbangan utama dalam menyusun dan memilih kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Dalam perencanaan, perlu diperhatikan keterkaitannya

dengan program unit lain untuk tim diperlukan perencanaan terpadu pada tingkat kecamatan.

4. Penambahan fasilitas hendaklah disesuaikan dengan program yang akan dikembangkan.
5. Perlu disusun rencana kegiatan yang lebih terperinci pada tingkat kecamatan dan desa.
6. Sarana, alat dan bahan praktikum perlu ditambah dan disempurnakan menurut jenis dan jumlah kegiatan yang diprogramkan.
7. Perlu penangan lebih serius tentang MCK, pembuangan sampah, maupun bersihkan lingkungan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1988, Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988, Jakarta, Yayasan Pelita.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, Petunjuk Teknis Pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) - PKK, Jakarta.
- Karim B. Ginarti, 1978, Usaha-usaha Perbaikan Gizi Keluarga, Forum Pendidikan, IKIP Padang, No.1 Tahun IV.
- Notopuro, Hardjito, 1984, Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Pudjosumedi dan Rohim, Ahmad Tahrizur, 1984, Islam dan Peranan Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Tiang Negara, Solo, Penerbit & Toko Buku Aneka.
- Mulyati, Djamain, Siti Aminah (Penyunting), 1987, Modul Latihan Manajemen dan Kepemimpinan Wanita Dalam Pembangunan, Jakarta, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Purwadarminta, WJS, 1961, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Propippda, 1976, Indikasi Sosial (Social Indikator), Padang, Kanwil P dan K Sumatera Barat.
- Hornby, AS, Gatenby, EV, Wakafield, H, The Advanced Learner's Dictionary of Current English, 1965, London, Oxford University Press.
- Soekanto, Soerjono, 1982, Sosiologi, Suatu Pengantar, Jakarta, CV Rajawali.
- Tim Penggerak PKK Pusat, 1987, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Mekanisme Gerakan PKK, Jakarta.

_____, Pedoman Tentang Pembentukan Kelompok PFK RW, RT dan Dasa Wisma, Jakarta.

Yunus, Yusmiana, 1975, Pengantar Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Padang FIP - IKIP Padang.

Yusuf, A. Muri, 1988, Metodologi Penelitian, Padang FIP - IKIP Padang.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
 P U S A T P E N E L I T I A N

Nomor : 1076/PT37.H9/N.4/1988 31 Desember 1988
 Lamp. :
 Hal : Mohon izin melakukan
 Penelitian

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH Tk. I
 Provinsi Sumatera Barat
 melalui
 Kepala Direktorat SOSPOL

Dengan hormat,

Dengan ini kami mohon agar Bapak sudi memberi izin kepada staf
 pengajar IKIP Padang :

N a m a : Drs. A. Muri Yusuf, M. Pd.
 NIP : 130 280 091
 Pangkat/gol. : Lektor Kepala, gol. IV/c
 Jabatan : Dosen FIP IKIP Padang

untuk melakukan penelitian :

Judul : Relevansi Program PKK dengan Kebutuhan Masyarakat
 di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

L o k a s i : Kec. Luhak Tanjung Pati Kab. 50 Kota
 W a k t u : 21 Januari s.d. 10 Februari 1989

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

K e p a l a,
 cap/dto.
 Dr. Zainil, M.A.
 NIP 130 187 088

Tembusan Yth. :

1. Rektor IKIP Padang sebagai laporan
2. Bupati KDH Tk. II Kab. 50 Kota
 u.p. Kepala Kantor SOSPOL
3. Dekan FIP IKIP Padang
4. Ketua Jurusan PPB IKIP Padang
5. Yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
No.B.070/6/SOSPOL/I/1989

Kami Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat, setelah mempelajari dan memperhatikan surat Kepala Puslit IKIP Padang No. : 1076/PT37.H9/N.4/88, tgl. 31-12-1988 perihal mohon izin penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Daerah Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

N a m a : Drs. A. Muri Yusuf, M. Pd.
Tempat/tgl lahir : Pasaman, 16 September 1942
Pekerjaan : Dosen FIP IKIP Padang
Nomor Kartu Identitas : 03001876-NPAG 030100.18767
A l a m a t : Kompleks IKIP Air Tawar Padang
Maksud/Tujuan Penelitian: Relevansi Program PKK dengan Kebutuhan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
Lokasi/Tempat penelitian: Kabupaten Lima Puluh Kota
Waktu Penelitian : 21 Januari s.d. 10 Februari 1989
Anggota peneliti : 1. Drs. Zulhendri
2. Drs. Daharnis
3. Drs. Maizul

dengan keterangan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitiannya kepada PEMDA setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 2(dua) eks. kepada Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat c.q. Dit SOSPOL dan 1 (satu) eks. kepada Bupati KDH Tk. II/Walikota yang bersangkutan.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka surat keterangan/rekomendasi ini akan dicabut kembali.

a.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumbar
Kepala Direktorat SOSPOL
u.b. Ka Subdit Pengamanan,

cap/dto.

Drs. Masrul Areal
NIP 010079343

Kepada YtB. :

87

Tembusan :

1. MENDAGRI c.q. Dirjen Sospol di Jakarta
2. LAKSUSDA Sumbagut di Medan
3. KAPOLDA Sumatera Barat di Padang
4. KAJATI Prop. Sumbar di Padang
5. DAN REM 032/Wirsbraja
6. Pembantu Gubernur Sumbar Wilayah I di Bukittinggi
7. Ketua BAPPEDA Tk. I Sumbar di Padang
8. Bupati KDH Tk. II 50 Kota di Payakumbuh
9. Kepala Pusat Penelitian IKIP Padang
10. A r s i p

SURAT IZIN/REKOMENDASI
NOMOR : 070/17/Sospol/I-1989

Berdasarkan surat keterangan/Rekomendasi Gubernur Kdh Tk.I Nomor : B. 070/61/Sospol/I-1989 dengan ini kami Pemerintah Kabupaten Dati II 50 Kota memberi izin untuk penelitian kepada :

N a m a : Drs. A. Muri Yusuf, M.Pd
Tempat/tgl. Lahir : Pasaman / 16 September 1942
Kartu Indentitas : 03001876 - NPAG 030100.18767.
Pekerjaan : Dosen FIP-IKIP Padang
A l a m a t : Komp. IKIP No. 141 Air Tawar Padang
Objek Penelitian : "RELEVANSI PROGRAM PKK DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DI KAB. 50 KOTA".
W a k t u : 21 Januari s.d. 10 Februari 1989
T e m p a t : Kabupaten 50 Kota
Anggota : 1. Drs. Zuhendri Zen
 2. Drs. Daharnis
 3. Drs. Maizul

Dengan ketentuan :

1. Tidak boleh meyimpang dari ketentuan penelitian tersebut di atas.
2. Memberitahukan/melaporkan diri pada pemerintahan setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan Laporan Hasil Penelitiannya sebanyak I (satu) Eksemplar pada Bupati KDH Tk. II 50 Kota Cg. Kepala Kantor Sospol di Payakumbuh.
5. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka surat keterangan/rekomendasi ini akan di cabut kembali.

Demikianlah surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 25 Januari 1989
 KEPALA KANTOR SOSPOL KABUPATEN
 50 KOTA,

dto

TEMBUSAN Yth. :

1. Gubernur Kdh Tk.I Sumbar
Cg. Kadit Sospol di Padang
2. Pembantu Gubernur Wil.I di Bukittinggi
3. Dandim 0306/50 Kota di Tanjung Pati
4. Kapolres 50 Kota di Payakumbuh
5. Camat Luhak di Air Tabit
6. Camat Kapur IX di Muara Paiti
7. Yang bersangkutan
8. Pertinggal.

Drs.Sy.Dt.Sinaro Sati
 NIP.010022580